LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
Sumber 45611

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT. kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk periode tahun 2022 sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi tentang informasi kinerja Dinas Pendidikan mengenai pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan secara baik, benar, akuntabel, efesien, responsif terhadap aspirasi masyarakat / publik dan menjadi masukan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, guna menjadikan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mendapat kepercayaan dari seluruh stakeholder.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan merupakan sarana pertanggungjawaban Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun yakni tahun 2022 serta merupakan tolok ukur untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan misinya.

Demikian Laporan Hasil Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, sebagai bahan pertimbangan bagi instansi berwenang yang mempunyai tugas dalam mengkaji dan mengevaluasi hasil akuntabilitas kinerja bidang pendidikan.

Cirebon, Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN CIREBON

H. RONIANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
Nip. 19701121 199903 1 006

DAFTAR ISI

			HALAMAN
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR LAMPIRAN			iii
IKHTISAR EKSEKUTIF			1
BAB I	PENDAHULUAN		3
	A	Gambaran Umum Unit Kerja	3
	B	Struktur Organisasi	7
	C	Tugas Pokok Dan Fungsi	8
	D	Lingkungan Strategis	23
	E	Sistematika Penyajian	37
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021		39
	A	Visi - Misi	39
	B	Tujuan	42
	C	Sasaran Strategis	46
	D	Indikator Kinerja Utama (IKU)	56
	E	Penetapan Kinerja Tahun 2021	47
BAB III		AKUNTABILITAS KINERJA	59
	A	Kerangka Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja	59
	B	Pengukuran Dan Analisa Kinerja	61
	C	Pembandingan Capaian Kinerja	74
	D	Akuntabilitas Keuangan	77
	E	Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran	78
BAB IV	PENUTUP		112

DAFTAR LAMPIRAN

1. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (TARGET DAN REALISASI) TAHUN 2021
2. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (REALISASI) TAHUN 2020 DAN 2021
3. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (REALISASI AKUMULASI) TAHUN 2021
4. REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI (2021) DENGAN RENCANA SESUAI RENSTRA

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2022 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangannya sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, serta pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2022 yang didasari oleh Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2019-2024. Selain media pertanggungjawaban Kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Akuntabilitas ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan Kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2022 telah ditetapkan 5 (Lima) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan. Rata-rata capaian Kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan pada Rencana Kinerja tahun 2022 menunjukkan angka keberhasilan sebagai berikut :

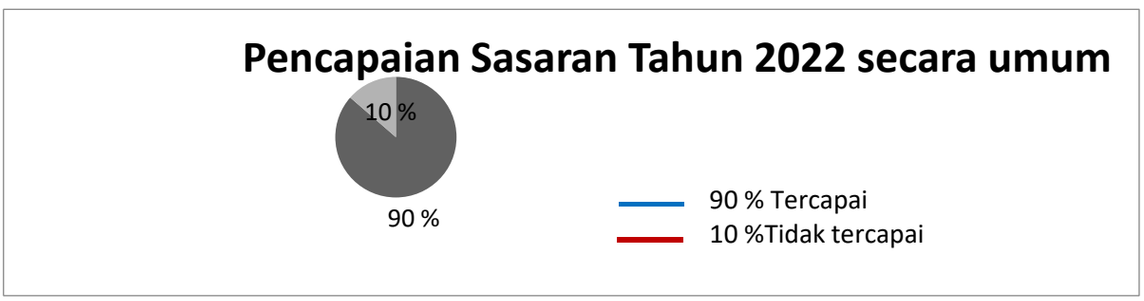

Dari tabel diatas terlihat 90 % mencapai target/meningkat dan 10 % tidak mencapai target. Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN sejumlah Rp.1.363.615.147.411,- dengan realisasi sejumlah Rp. 1.311.155.346.387- atau 96,15%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp. 52.459.801.024,-. *(sisa anggaran ini adalah dari belanja gaji dan tunjangan pegawai yang tidak terserap sebesar Rp 42.583.596.964 dan Sisa belanja kegiatan sebesar Rp 9.876.204.060*)

Dalam pengelolaan anggaran tersebut Dinas Pendidikan melaksanakan 2 (dua) Program anggaran belanja yaitu untuk anggaran belanja operasional dan anggaran belanja modal. Pelaksanaan kegiatan Non urusan yang melekat pada SKPD (operasional) pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan melalui Satu (1) Program, Tujuh (7) Kegiatan, dan Dua Puluh (21) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 985.315.827.711,- dengan capaian realisasi sebesar Rp 942.479.588.753,- (95,65%) dan sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp 42.836.238.958,- yang merupakann sisa anggaran dari belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan Rp 42.583.596.964,-) dan Rp 252.233.882 merupakan sisa hasil penawaran dan penyesuaian belanja sesuai kebutuhan kegiatan non urusan).

Sementara itu Program Urusan Pendidikan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan pada Tahun Anggaran 2022 didukung melalui Tiga (3) Program Kegiatan, dengan Enam (6) Kegiatan, dan Empat Puluh Delapan (48) Sub Kegiatan dengan ditunjang anggaran sebesar Rp 378.299.319.700,- dengan serapan realisasi anggaran sebesar Rp 368.675.757.634,- atau tercapai sebesar 97,46%, sehingga masih ada sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 9.623.562.066,- . yang merupakan sisa hasil penawaran fisik dan jasa konsultansi dan penyesuaian belanja lainnya.

Secara keseluruhan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian pada tahun 2022 dan seterusnya harus terus ditingkatkan akselerasinya dengan melakukan *upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah* melalui percepatan pembangunan manusia dari aspek pendidikan.

Sumber, Februari 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN CIREBON

H. ROMANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
Nip. 19701121 199903 1 006

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM UNIT KERJA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kesejahteraan masyarakat yang diadopsi oleh Pemerintah dari konsep UNDP yang menunjukkan laju perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. IPM dibentuk atas dasar 3 (tiga) komponen, yaitu Indeks Pendidikan (IP), Indeks Kesehatan (IK), dan Indeks Daya Beli (IDB). Masing-masing komponen memberikan tingkat kontribusi yang sama terhadap besaran IPM.

Pemerintah Kabupaten Cirebon konsisten menggunakan IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2021 IPM Kabupaten Cirebon 69,12 dan pada tahun 2022 IPM 76,05 Indek Point. Untuk setiap kenaikan 1 (satu) angka IPM diperlukan perubahan paradigma, baik dalam aspek manajemen, kinerja aparatur, budaya kerja, dan penyediaan anggaran biaya. Untuk mencapai target IPM tersebut perlu adanya upaya-upaya strategis untuk mengakselerasi pencapaiannya.

Pembangunan pendidikan harus dilakukan secara lintas sektoral dan terpadu antar instansi pemerintah serta antara pemerintah, masyarakat, dan orangtua. Untuk itu perlu dikembangkan iklim pembangunan pendidikan yang memungkinkan bagi setiap komponen pemerintahan maupun masyarakat untuk bisa secara bersama-sama membahas pendidikan sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya masing-masing.

Masalah-masalah teknis non-kependidikan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan antara lain komunikasi, transportasi, sosial budaya, dan sosial ekonomi Penanganannya perlu dilakukan secara lintas sektoral, agar pemerataan pendidikan dan pemberian pelayanan pendidikan minimal bagi masyarakat bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Salah satu komponen IPM adalah indek pendidikan, sedangkan RLS dan HLS merupakan indikator dalam pencapaian indek pendidikan. Dengan demikian perlu adanya data yang lengkap dan akurat sebagai dasar penyusunan perencanaan tentang jumlah penduduk usia sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana, karena semua itu saling terkait dalam meningkatkan RLS dan HLS sehingga pada gilirannya dapat mendongkrak IPM sesuai target yang ditetapkan.

1. **Jumlah penduduk usia sekolah**

Penduduk Kabupaten Cirebon berjumlah 2.410.327 orang, laki-laki 1.222.477 Orang dan perempuan 1.187.850 orang tersebar di 40 Kecamatan / 424 desa dan Kelurahan. Dari jumlah tersebut penduduk usia sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SM sumber data *Hasil Perapihan Umur dari Data Administratif dan SP2020* sebanyak 728.042 orang terdiri dari laki-laki 374.756 orang dan perempuan 353.286 orang.

Penduduk Usia Prasekolah – Sekolah Menengah Pertama

No	Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	05-06	62.270	57.730	120.000
2	07-12	118.336	114.984	233.320
3	13-15	54.206	52.634	106.840
Jumlah		234.812	225.348	460.160

Sumber data : Disdukcapil 2022

kondisi ekonomi keluarga miskin 247.940 orang atau 12,01% dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan 1.30 dan Indeks Keparahan Kemiskinan 0.24.

2. **Jumlah peserta didik**

Banyak sedikitnya jumlah peserta didik berpengaruh langsung pada tingkat capaian RLS sekaligus tingkat capaian APK, APM pada semua jenjang pendidikan. Dengan demikian perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk terus meningkatkan jumlah peserta didik pada semua jenjang.

Jumlah Peserta Didik

No	Jenjang	Formal	Non Formal	Jumlah
1	PAUD	36.822	21.329	56.151
2	SD, MI	233.721	583	234.304
3	SMP, MTS	114.544	3.890	118.434
Jumlah		383.031	25.802	408.833

Sumber data : Profil Pendidikan 2022/2023

3. **Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan**

Dalam rangka merealisasikan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diperlukan tenaga pendidik dan kependidikan dengan jumlah yang memadai. Saat ini jumlahnya masih sangat kurang atau belum sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan sehingga mayoritas sekolah mengangkat tenaga honorer untuk menutup kebutuhan tersebut. Selain itu masih terdapat berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi guru, antara lain ; (1) adanya keberagaman kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan, (2) belum

adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan guru (3) pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan, dan (4) kesejahteraan guru yang belum memadai. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut dibawah ini dapat dilihat jumlah tenaga penndidik dan kependidikan di Kabupaten Cirebon.

Jumlah Tenaga Pendidik

No	Jenjang	Formal	Non Formal	Jumlah
1	PAUD	2.952	1.249	4.201
2	SD, MI	11.398	215	11.613
3	SMP, MTS	7.157	265	7.422
Jumlah		21.507	1.729	23.236

Sumber data : Profil Pendidikan 2022/2023

4. Jumlah sarana dan prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mutlak diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai baik jumlah maupun kwalitasnya. Saat ini yang terlihat jelas adalah masih kurangnya daya tampung apabila dibandingkan antara rasio jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah ruang kelas yang ada pada setiap jenjang pendidikan. Apabila tidak segera diatasi maka akan berdampak pada rendahnya APK, APM di Kabupaten Cirebon.

Jumlah lembaga/Sekolah dan Ruang Kelas

No	Jenjang	Formal	
		Lembaga	R. Kelas
1	PAUD	328	1.089
2	SD, MI	1.105	7.172
3	SMP, MTS	344	3.614
Jumlah		1.449	11.875

Sumber data : Profil Pendidikan 2022/2023

5. Manajemen pengelolaan pendidikan

Seiring bergulirnya era otonomi daerah dimana terdapat pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah sehingga membawa nuansa baru dalam sistem pengelolaan pendidikan di Kabupaten Cirebon.

Otonomi pendidikan memerlukan profesionalisme pengelolaan manajemen baik tingkat Kabupaten , kecamatan maupun tingkat sekolah. Sebagian besar pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen pendidikan di Kabupaten Cirebon sudah berjalan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti kinerja manajemen birokrasi pendidikan masih dirasa kurang sehingga tingkat efisien dan efektifitasnya masih rendah. Kurang tersedia data pendidikan yang akurat, tepat dan akuntabel, untuk itu perlu secepatnya dibangun sistem pendataan pendidikan

yang terpadu antara Dinas sampai ke sekolah-sekolah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang handal.

Otonomi Daerah juga berdampak pada pengelolaan manajemen ditingkat sekolah yang dikenal dengan manajemen berbasis sekolah atau school based management. Saat ini seluruh sekolah di Kabupaten Cirebon telah melakasanakan MBS ditandai dengan adanya beberapa prinsip umum yang patut menjadi pedoman dalam pelaksanaan MBS diantaranya : sekolah telah memiliki visi, misi dan strategi kearah pencapaian mutu pendidikan, melibatkan partisipasi masyarakat, terbentuknya Komite Sekolah serta adanya transparansi dan akuntabilitas dimana sekolah beserta Komite Sekolah merupakan institusi terdepan yang paling bertanggungjawab dalam pengeloaan Pendidikan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Lampiran IV : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 1 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

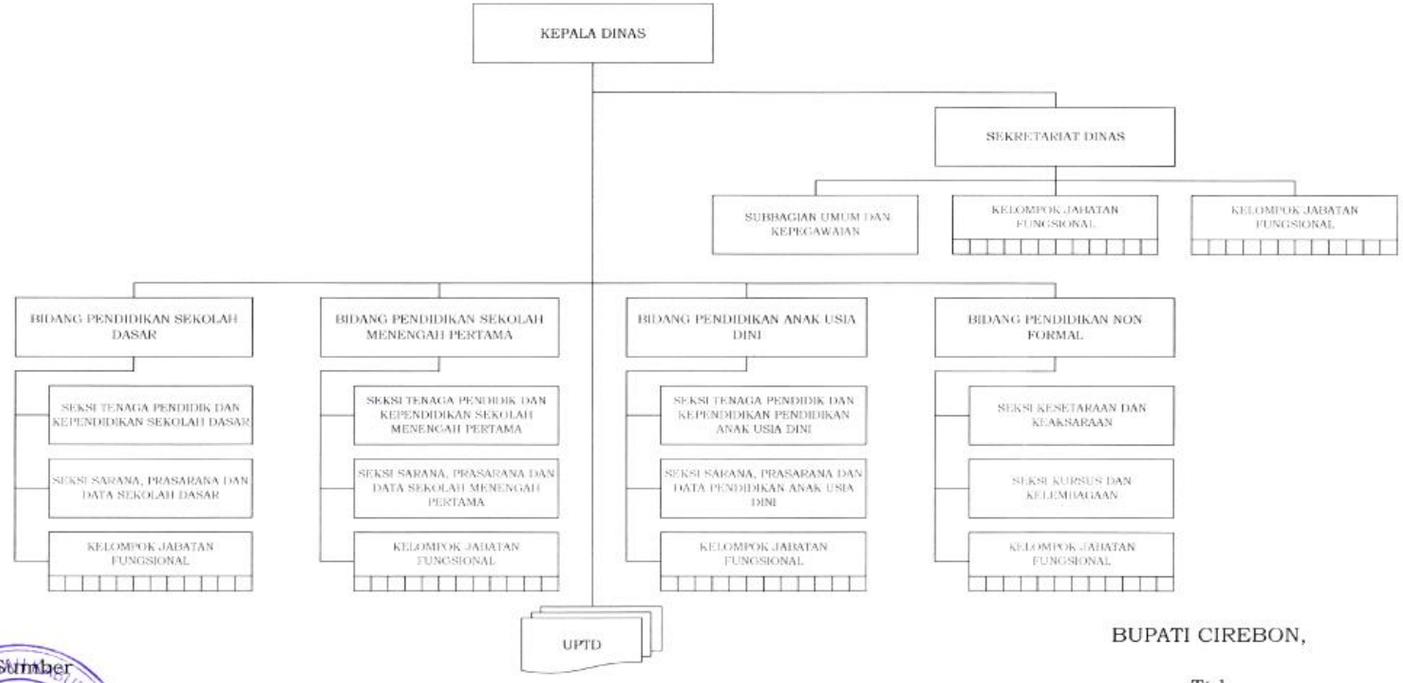

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

SETDA CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

(1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah,

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Pendidikan;

b. perumusan kebijakan bidang pendidikan;

c. pengelolaan pendidikan;

d. pengembangan kurikulum;

e. pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

f. pengendalian perizinan pendidikan;

g. pengembangan bahasa dan sastra;

h. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan;

i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

(1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat Dinas mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan.

(3) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;
b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan
e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

(1) Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Sekretariat Dinas,
Terdiri dari :
a. Kelompok Substansi Keuangan dan Aset yang dipimpin oleh Sub Koordinator Keuangan dan Aset; dan
b. Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dipimpin oleh Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
f. pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan;
g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
j. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

(1) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan sekolah dasar yang meliputi urusan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana dan data sekolah dasar.

(3) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sekolah dasar;
c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan sekolah dasar serta sarana prasarana dan data sekolah dasar;

d. pelayanan informasi publik di daerah bidang pendidikan sekolah dasar yang meliputi urusan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan sekolah dasar, sarana, prasarana dan data sekolah dasar;
e. pengolahan data analisis bidang pendidikan sekolah dasar yang meliputi urusan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan sekolah dasar, sarana, prasarana dan data sekolah dasar;
f. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;
g. penyusunan bahan akreditasi, penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar;
h. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana, prasarana dan data Sekolah Dasar (SD);
i. pengendalian, pemantauan dan evaluasi mutu guru, kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, dan sarana, prasarana dan data Sekolah Dasar;
j. pelaporan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana, prasarana dan data Sekolah Dasar;
k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

(1) Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, terdapat Kelompok Substansi Kurikulum Sekolah Dasar yang dipimpin oleh Sub Koordinator Kurikulum Sekolah Dasar.
(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.

3.1 Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar

(1) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.
(2) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan tenaga teknis pendidik dan kependidikan sekolah dasar.

(3) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar;
c. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar;
d. pengusulan dan pemberian rekomendasi pemindahan, pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar;
e. pengendalian data sistem informasi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan;
f. pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar agar dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Dasar

(1) Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Dasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.

(2) Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Dasar mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan sarana, prasarana dan data sekolah dasar.

(3) Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Dasar;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana, prasarana dan data sekolah dasar;
c. penyusunan dan pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar;
d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar;

e. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan sekolah dasar;
f. pengoordinasian pencatatan dan pelaporan (penatausahaan) sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar;
g. pengelolaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi sarana dan prasarana sekolah dasar;
h. pengelolaan data dan profil pendidikan sekolah dasar;
i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Dasar; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

(1) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
(2) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan sekolah menengah pertama yang meliputi urusan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana, prasarana dan data sekolah menengah pertama.
(3) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sekolah menengah pertama;
c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Kurikulum, Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama;
d. pelayanan informasi publik di daerah bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
e. pengolahan data analisis bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
f. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama (SMP);
g. penyusunan bahan akreditasi, penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
h. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana, prasarana dan data Sekolah Menengah Pertama (SMP);

i. pengendalian, pemantauan dan evaluasi mutu guru, kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana dan data Sekolah Menengah Pertama (SMP);
j. pelaporan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana dan data Sekolah Menengah Pertama (SMP);
k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

(1) Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdapat Kelompok Substansi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama yang dipimpin oleh Sub Koordinator Kurikulum Sekolah Menengah Pertama.
(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

4.1 Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP

(1) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
(2) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama,
(3) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
   a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
   b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tenagapendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama;
   c. penyusunan rencana kebutuhan dan mendata tenaga pendidik dan kependidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama;
   d. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama;
   e. pengusulan atau pemberian rekomendasi pemindahan, pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama;
   f. pengendalian data sistem informasi manajemen tenaga pendidik dan

kependidikan;

g. pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama agar dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Seksi Sarana Prasarana, dan Data SMP

(1) Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

(2) Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan sarana, prasarana dan data sekolah menengah pertama.

(3) Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana, prasarana dan data sekolah menengah pertama;
c. penyusunan dan pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
e. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan sekolah menengah pertama;
f. pengoordinasian pencatatan dan pelaporan (penatausahaan) sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
g. pengelolaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
h. pengelolaan data dan profil pendidikan sekolah menengah pertama;
i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang meliputi urusan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana, prasarana dan data pendidikan anak usia dini.

(3) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan anak usia dini;
c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Kurikulum, Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sarana Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini;
d. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini;
e. penyelenggaraan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana, prasarana dan data di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
g. pelayanan informasi publik di daerah bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
h. pengolahan data analisis bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

(1) Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, terdapat Kelompok Substansi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini yang dipimpin oleh Sub Koordinator Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini,

(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini,

5.1 Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD

(1) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini.

(2) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan» memantau» mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan tenaga teknis pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini.

(3) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini;
c. penyusunan rencana kebutuhan dan mendata tenaga pendidik dan kependidikan pada PAUD;
d. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
e. pengusulan dan pemberian rekomendasi pemindahan, pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
f. pengendalian data sistem informasi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan;
g. pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD agar dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Seksi Sarana Prasarana, dan Data PAUD

(1) Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini.

(2) Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan sarana, prasarana dan data pendidikan anak usia dini.

(3) Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana, prasarana dan data pendidikan anak usia dini;
c. penyusunan dan pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;
d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;
e. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan pendidikan anak usia dini;
f. pengoordinasian pencatatan dan pelaporan (penatausahaan) sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;
g. pengelolaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;
h. pengelolaan data dan profil pendidikan anak usia dini;
i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

6. BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL

(1) Bidang Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan non formal yang meliputi kurikulum, kesetaraan dan keaksaraan serta kursus dan kelembagaan pendidikan non formal.

(3) Bidang Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pendidikan Non Formal;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan non formal;
c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Kurikulum, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Kelembagaan;
d. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Non Formal;
e. penyelenggaraan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan Non Formal;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana dan data di bidang pendidikan Non Formal;
g. pelayanan informasi publik di daerah bidang Pendidikan Non Formal yang meliputi Kurikulum, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Kelembagaan;
h. pengolahan data analisis bidang Pendidikan Non Formal yang meliputi Kurikulum, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Kelembagaan;
i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Non Formal; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

(1) Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Bidang Pendidikan Non Formal, terdapat Kelompok Substansi Kurikulum Pendidikan Non Formal yang dipimpin oleh Sub Koordinator Kurikulum Pendidikan Non Formal.
(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

6.1 Seksi Kesetaraan Dan Keaksaraan

(1) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan dipimpin oleh Kepala Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal;
(2) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan.
(3) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesetaraan dan keaksaraan;
c. pelaksanaan pembinaan dan penetapan kesetaraan dan keaksaraan;

d. pelaksanaan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggaraan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SM A dan Keaksaraan;
e. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi program Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;
f. pelaksanaan lomba pendidik dan kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;
g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

6.2 Seksi Kursus dan Kelembagaan

(1) Seksi Kursus dan Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.
(2) Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan kursus dan kelembagaan pendidikan non formal.
(3) Seksi Kursus dan Kelembagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Kursus dan Kelembagaan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kursus dan kelembagaan;
c. penyusunan dan pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan non formal;
d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan nonformal;
e. perencanaan dan pendataan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan kursus dan kelembagaan;
f. pelaksanaan pembinaan tenaga teknis pendidik dan kependidikan kursus dan kelembagaan;
g. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan kursus dan kelembagaan;
h. pelaksanaan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggaraan kursus dan kelembagaan;
i. pelaksanaan lomba pada lembaga kursus dan kelembagaan berprestasi;
j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kursus dan Kelembagaan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

D. LINGKUNGAN STRATEGIS

1.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Pendidikan

Pendidikan menjadi penentu kemajuan daerah. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Permasalahan dan tantangan yang terjadi pada pencapaian pembangunan Pendidikan 2019-2024 tentunya menjadi antisipasi bagi pelaksanaan pembangunan pada tahapan lima tahun berikutnya yaitu tahun 2024-2029. Beberapa tantangan pembangunan Pendidikan yang dihadapi ke depan adalah:

- Belum meratanya distribusi guru PNS
- Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi
- Nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah
- Belum sinergisnya pembagian tata kelola Pendidikan antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait kewenangan.
- Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap Pendidikan, terutama di tingkat Pendidikan menengah

Rendahnya minat baca masyarakat,

- Masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan baik sarana prasarananya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya
- Belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi maupun melalui program perpustakaan keliling
- Belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelola perpustakaan sekolah, untuk bekerja sama dengan komunitas literasi. Seperti forum perpustakan desa/kelurahan atau, forum perpustakaan taman bacaan masyarakat.

Dengan beberapa permasalahan yang ada, maka berakibat pada Indek Angka Rata-rata Pendidikan masyarakat masih rendah. Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata Lama Sekolah masyarakat Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 (Update BPS Jabar Desember 2022) baru pada kisaran 7,40 tahun, ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam melanjutkan sekolah sudah termasuk ke dalam kategori meningkat terutama pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) ke jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Selain itu, angka Harapan Lama Sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Cirebon masih sangat rendah pada tahun 2022 baru mencapai 12,28 Tahun.

Harapan Lama Sekolah ini menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 sebesar 12,28 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,28 tahun atau setara dengan Diploma I.

Permasalahan yang dihadapi

Semakain hari permasalahan pendidikan bukannya semakin berkurang, justru permasalahan ini semakin kompleks seiring dengan tuntutan globalisasi segala penjuru kehidupan, dimana filter tidak lagi dapat membendung sisi negatif dari seluruh interaksi setiap individu. Secara garis besar permasalahan pendidikan setidaknya dapat diklasifikasikan kedalam 3 pokok masalah sebagaimana uraian dibawah ini.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 – 2024

No.	Masalah Pokok	Perasalahan	Akar masalah
1	2	3	4
1	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.	1 Aksesbilitas Pendidikan belum merata	1 Masih kekurangan Ruang Kelas pada Sekolah Negeri terlebih untuk jenjang SMP
			2 Kemampuan daya tamping siswa yang masih terbatas
			3 Masih ada animo masyarakat harus bersekolah di sekolah Negeri atau Sekolah yang Tekenal (Favorit)
			4 Belum diterapkannya Sistem zonasi pada jenjang Sekolah Dasar
		2 Kompotensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih rendah	1 Guru PNS masih kurang pada Sekolah Negeri
			2 Masih banyak guru yang belum bersetifikat pendidik sesuai profesinya
			3 Kurangnya pengawasan terhadap kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berdampak reward atau funishment
			4 Kurang maksimalnya fungsi peran komunitas belajar (KKG/MGMP, KKKSD/MKKSSMP))
			5 Masih banyaknya guru yang belum linear dalam mengampu pembelajaran.
			6 Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah

				terutama Honorer (Non ASN)
			7	Belum efektifnya Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau Kepala Sekolah (PKKS)
			8	Belum berjalannya sistem Penilaian Prestasi Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjadi Capaian SKP tahunan PNS Khususnya.
		3 Mutu dan jumlah sarana prasarana pendidikan belum mamadai	1	Kondisi ruang kelas masih banyak yang rusak
			2	Alat praktik dan peraga pembelajaran banyak yang rusak
			3	Masih banyaknya sekolah (SD dan SMP) yang belum memiliki sarana utama penunjang pembelajaran (Labora-Torium dan Perpustakaan)
No.	**Masalah Pokok**	**Perasalahan**		**Akar masalah**
			4	Standar harga sarana penunjang KBM tinggi
			5	Masih banyaknya sekolah yang belum menyediakan fsilitas fisik ramah anak/murid
		4 Tata Kelola Pendidikan masih rendah	1	Masih banyak siswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu
			2	Tingkat pendidikan orang tua masih rendah dan pengaruh lingkungaan dalam pergaulan anak
			3	Jumlah sekolah yang menerapkan program sekolah inklusi untuk melayani anak yang berkebutuhan khusus sangat kurang
			4	Masih belum maksimalnya pemberdayaan MBS dalam pengelolaan sekolah
			5	Belum maksimalnya pelibatan pemangku kepentingan dalam perumusan program kerja sekolah (RKS/RKAS)
			6	Masih banyaknya sekolah dalam manajemen RKS (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta tindaklanjut) belum sistemik (siklus standar mutu)

1.1.1 Aksesibilitas pendidikan belum merata

a) Masih terdapat sebagian masyarakat yang kemampuan daya belinya masih rendah.

b) Masih adanya kendala budaya dan/atau tradisi di dimasyarakat yang menganggap kurang pentingnya pendidikan;

c) Belum semua sekolah menerima anak berkebutuhan khusus;

d) Masih terdapat perusahaan/ Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) tidak mensyaratkan

ijazas sebagai syarat diterimanya bekerja;

1.1.2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih rendah

a) Kurang meratanya tingkat profesionalisme guru dalam strategi pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan.
b) Kolaborasi dalam pembaharuan kegiatan belajar melalui kerja sama antara guru belum berkembang dengan baik sebagai bagian dari dinamika budaya kerja;
c) Belum tercipta kegiatan yang dapat menampilkan produk karya secara kompetitif untuk guru;

1.1.3 Mutu dan Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan belum memadai

a) Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah;
b) Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;
c) Terdapat kesenjangan fasilitas sarana penunjang pembelajaran, seperti perpustakaan, laboratorium serta media pembelajaran lainnya belum merata pada seluruh sekolah;
d) Media belajar siswa dan media penampilan hasil belajar siswa belum mendapat perhatian baik di setiap sekolah;
e) Internet sebagai sumber belajar belum optimal diberdayakan dengan baik;

1.1.4 Tata Kelola Pendidikan masih rendah

a) Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah;
b) Belum tersedia data pendidikan yang akurat disebabkan belum adanya tenaga fungsional khusus pendataan;
c) Belum optimumnya Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah., kelompok kerja guru/MGMP dan supervisi kinerja guru;
d) Sistem perencanaan yang berkembang dalam bentuk penyusunan rencana strategis dan program tahunan pada tingkat sekolah belum berkembang baik;
e) Proses pelaksanaan tugas yang berbasis perencanaan masih sangat lemah;
f) Belum optimumnya fungsi Komite Sekolah dan Dewan Sekolah untuk meningkatan mutu pengorganisasian yang lebih efektif.

1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi “TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN” dan **Misi** :

1. Kabupaten Cirebon Berbudaya “Mewujudkan Masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai Budaya, Tradisi dan Adat Istiadat
2. Kabupaten Cirebon Sejahtera “Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
3. Kabupaten Cirebon Agamis “Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika”

4. Kabupaten Cirebon Maju “Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah”
5. Kabupaten Cirebon Maju “Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional”

dalam pembangunan Kabupaten Cirebon perlu diterjemahkan dalam kebijakan umum dan program pembangunan yang spesifik. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran, dan program-program yang *inherent.* Kebijakan umum tersebut diantaranya yang tertera pada misi ke **1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.**

1.3 Talaahan Rencana Strategis

Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dalam lima tahun kedepan visi Gubernur Jawa Barat yakni **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi ”**. Makna dari Visi tersebut adalah Jabar Juara Lahir Batin bahwa pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri. Inovasi adalah bahwa Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan Inovasi untuk meningkatkan pelayanan Publik, kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan makna Kolaborasi adalah perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Untuk mewujudkan Jabar Juara maka dilakukan beberapa misi, salah satunya aspek misi dalam ruang lingkup pendidikan. Misi tersebut

“Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif”. Misi ini diarahkan menghadirkan pelayanan publik berkualitas hingga ujung batas wilayah. Agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati Pendidikan dan kesehatan. Perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya untuk dapat berperan aktif mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari misi tersebut melahirkan beberapa program sebagai upaya mewujudkan visi dan misi tersebut yakni Menghadirkan Sekolah Jabar yaitu Inovasi Layanan Pendidikan Menengah di Jawa Barat yang memberikan peluang seluas- luasnya kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat dalam mengakses Layanan Pendidikan. Tanpa terhalang faktor ekonomi, geografis, sosial, budaya atau faktor lainnya. Melalui layanan Pendidikan

yang ramah, murah, mudah, bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

1.3.1 Analisis lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang berpengaruh terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dimana di dalamnya mencakup (1) sumberdaya aparatur; (2) sarana dan prasarana; dan (3) organisasi kelembagaan. Rincian kekuatan dan kelemahan lingkungan internal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Kekuatan

a). Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon secara efisien dan efektif sehingga dapat berkompetisi di kancah global, hal ini telah dibuktikan dengan diraihnya beberapa prestasi kejuaraan baik di dalam penguasaan mata peiajaran, seni budaya maupun prestasi olahraga di tingkat Propinsi maupun Nasional.

b) Adanya kesepakatan dari seluruh jajaran pendidikan untuk mendukung visi Kabupaten Cirebon dalam misi 1 "**Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi"**. Implementasi hal tersebut tercermin dalam program dan kegiatan yang selama ini digulirkan serta anggaran pendidikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

c) Tersedianya sumberdaya aparatur pendidik dan kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan, hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan yang siap untuk menjalani tantangan pembangunan pendidikan di era globalisasi sekarang ini.

d) Tersedianya sarana dan prasarana yang siap untuk dikembangkan guna menghadapi tantangan perkembangan IPTEK dan dunia global, hal ini dapat dilihat dari aset yang dimiliki baik berupa gedung perkantoran, gedung persekolahan, mesin-mesin, perbengkelan, ketersediaan lahan yang senantiasa siap untuk dibangun dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

e) Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan bahkan sampai pada tingkat Sekolah dan masyarakat Siap melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan, pengambilan kebijakan sampai kepada penyelenggaraan teknis pembelajaran.

Kelemahan

a) Belum terbangunnya koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antar lini, unit dan institusi pendidikan di dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Hal ini disebabkan antara lain masih adanya ego sektoral serta bervariasinya kemampuan SDM aparatur maupun kemampuan daya beli masyarakat yang seringkali menjadi kendala di dalam pembangunan di bidang pendidikan.
b) Belum seragamnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dalam melaksanakan tugas kedinasan dan memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena terjadinya penyimpangan terhadap komitmen yang disepakati sehingga menjadi kendala terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan.
c) Belum efektifnya rentang kendali dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan, hal ini disebabkan karena : (a) Penegakkan hukum tidak/kurang tegas; (b) besarnya populasi persekolahan yang harus diawasi; (c) kurangnya keterlibatan aparatur pendidikan yang ada di lapangan dalam melaksanakan pengawasan; dan (d) kurangnya dukungan dana dan fasilitas operasional.
d) Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengawasan, hal ini disebabkan karena: (a) besarnya populasi persekolahan yang tersebar sampai di pelosok desa; (b) kurang sadar dan tanggapnya aparat terhadap pentingnya kehadiran data bagi perencanaan dan pengawasan; (c) belum terbangunnya sarana dan mekanisme pendataan yang efisien dan efektif yang berbasis teknologi informasi dari tingkat Kabupaten sampai ke sekolah-sekolah sebagai sumber data primer; dan (d) kurangnya dukungan dana operasional dan teknologi sehingga mengakibatkan perencanaan menjadi tidak matang dan pengawasan tidak efektif.

1.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada diluar kendali organisasi tetapi rnempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis tersebut digunakan teknis analisis SWOT *(Strength, Weakness, Opportunity dan Threat)* dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan.

Peluang

a) Media massa elektronik maupun cetak yang berskala lokal, regional maupun nasional banyak terdapat di Kabupaten Cirebon, hal ini perlu dijadikan peluang yang efektif bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program-program kepada masyarakat secara luas. Untuk itu keberadaan media ini perlu dimanfaatkan

dengan baik dan efektif melalui jalinan kerjasama yang saling menguntungkan.

b) Adanya kepedulian masyarakat, pengusaha terhadap pendidikan dan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan pembangunan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari antusiasnya masyarakat (stakeholders) menyambut penerapan inovasi-inovasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang difasilitasi melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekoiah (MBS), Badan Akreditasi Sekoiah (BAS), *Broad Based Education (BBE) and Life Skill* serta gerakan-gerakan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan mulai dari pembentukan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), kemudian menjadi Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), Dewan Pendidikan (DP)/ Dewan Sekoiah, sampai kepada Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP).

c) Posisi geografis Kabupaten Cirebon yang merupakan lintasan antar propinsi-propinsi di Indonesia memiliki nilai strategis untuk menjadi pintu gerbang dan cermin pendidikan bukan hanya pada skala propinsi tapi juga pada skala Nasional. Hai ini menjadi peluang besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk melaksanakan pembangunan pendidikan secara akseleratif dan berkesinambungan.

Tantangan

a) Kabupaten Cirebon sebagai tempat tujuan untuk mencari kerja/nafkah Seiring pertumbuhan dunia industri mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini menjadi tugas berat jajaran pendidikan di Kabupaten Cirebon guna menuntaskan program-program pendidikan, khususnya Rintisan Wajar 12 Tahun karena semakin besarnya populasi penduduk yang harus dilayani.

b) Geografis Kabupaten Cirebon yang cukup luas dan masih terdapat beberapa daerah terpencil. Hal ini telah menyebabkan tidak meratanya penyebaran pelayanan pendidikan sehingga menjadi tantangan berat di dalam melakukan inovasi dan akselerasi pendidikan.

c) Kendala budaya tradisional dan pengaruh negatif budaya luar menimbulkan permasalahan yang kompleks di dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon, hal ini menuntut penanganan tersendiri melalui pendekatan-pendekatan khusus agar pembangunan pendidikan bisa berjalan secara sinergis dan serentak. Dalam posisi pendidikan yang merupakan kebutuhan dan perhatian semua orang, menjadi primadona dalam pencapaian IPM 80 serta dibebani dampak reformasi yang kebablasan, mengakibatkan banyak pihak berkeinginan dan memaksakan diri untuk ikut campur mengawasi pelaksanaan pembangunan pendidikan tanpa mau mengerti permasalahan internal kelembagaan. Hal ini menjadi beban berat bagi jajaran pendidikan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan secara efisien dan efektif karena terlalu banyak campur tangan pihak luar terhadap pengelolaan pendidikan. Hal ini berdampak besar terhadap aspek psikologis para aparatur di dalam bekerja dan meningkatkan kinerjanya.

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan interlan mencaup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi umumnya dapat dikenadalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi tetapi mempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisi lingkungan Strategis digunakan teknis analisis SWOT (Strength, Weakneess, Opportunity, dan Thereat) dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan wilayah disusun berdasarkan rencana struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Kabupaten Cirebon memiliki beberapa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara, PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang akan dipromosikan menjadi PKL. Setiap PKL dan PKLp mempunyai peran dan fungsi berbeda. Adapun peran dan fungsi masing-masing PKL dan PKLp sebagai berikut:

PKL Ciledug dan PKLp Losari dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perikanan laut, perdagangan hasil pertanian, industri, pergudangan, pelabuhan, pelayanan sosial ekonomi, perumahan, pendidikan tinggi, perdagangan hasil pertambangan dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Ciledug meliputi Kecamatan Losari (PKLp); Pabedilan; Pabuaran; Waled; Babakan; Gebang; dan Pasaleman

PKL Lemahabang dan PKLp Astanajapura dengan fungsi utama sebagai industri manufaktur. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan industri, pertanian, perikanan laut, perumahan, pelayanan sosial, pariwisata, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pendidikan kejuruan, industri hasil hutan dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Lemahabang meliputi Astanajapura (PKLp); Mundu; Pangenan; Sedong; Susukanlebak; Karangsembung; dan Karangwareng

PKL Sumber dan PKLp Weru dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, fungsi penunjang PKN, pendidikan tinggi, pertanian, pariwisata, industri, perikanan budidaya, pertambangan, dan pelayanan sosial ekonomi; Wilayah Pelayanan PKL Sumber meliputi Kecamatan Weru (PKLp); Beber; Greged; Plered; Tengahtani; Talun; Kedawung; dan Gunungjati.

PKL Palimanan dan PKLp Plumbon dengan fungsi utama sebagai sentra industry. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, pariwisata sejarah, agro wisata, industri batu alam, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pertanian, perikanan budidaya, pelayanan sosial, pendidikan kejuruan, dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Palimanan meliputi Kecamatan Plumbon (PKLp); Klangenan; Jamblang; Depok; Dukupuntang; dan Gempol.

PKL Arjawinangun dan PKLp Kapetakan dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian tanaman pangan. Fungsi penunjangnya adalah perikanan tangkap dan budidaya, perumahan, agro wisata, industri, pendidikan tinggi, pelayanan sosial.

ANALISIS

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada diluar kendali organisasi tetapi rnempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis tersebut digunakan teknis analisis SWOT *(Strength, Weakness, Opportunity dan Threat)* dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

1.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Setelah berakhirnya periode Rencana Strategis Bidang Pendidikan dengan fokus penguatan layanan pendidikan, pada tahapan selanjutnya yakni periode 2019-2024, fokus pembangunan pendidikan pada layanan pendidikan yang berkaitan dengan peserta didik, pendidik, sarana prasarana serta tatakelola pendidikan jenjang pendidikan pra sekolah, SD dan SMP serta pendidikan non formal. Untuk menentukan langkah penanganan pembangunan pendidikan perlu adanya identifikasi isu strategis yang tepat dan menggambarkan kondisi pendidikan di Kabupaten Cirebon. Isu-isu strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1.5.1 Melek huruf latin dan Al-Qur’an

Tingkat buta huruf Alquran di Indonesia terbilang tinggi. Hasil riset dari Institut Ilmu Alquran (IIQ) akhir pekan lalu mencatat sekitar 65 persen masyarakat Indonesia buta huruf Alquran. Begitu pula di Kabupaten Cirebon meski jumlah Pesantren tidak sedikit namun tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat melek huruf Al-Qur’an (Huruf arab) masih rendah.

Isu Strategis ini harus menjadi perhatian bagi semua kalangan. Sungguh sangat mengejutkan dan perlu dibahas dalam penyusunan program khususnya institusi terkait serta masyarakat pada umumnya melalui pendidikan informal (didalam), formal (di

sekolah) maupun non formal (Pendidikan oleh masyarakat). Peran aktif masyarakat sangat diperlukan seperti melalui Dewan masjid dan lain-lain. Salah satu cara untuk meningkatkan tingkat melek Alquran Kabupaten Cirebon adalah pencanangan program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Gemar Mengaji). Program tersebut terinspirasi dari budaya sebagian besar masyarakat Muslim tempo dulu, yang kerap melakukan amalan tadarus Al Qur'an tiap ba'da shalat Maghrib.

Kemiskinan dan kebodohan ibarat lingkaran setan yang tak berujung pangkal. Beruntung di Kabupaten Cirebon hanya sekitar 10% masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Namun demikian bukan berarti berbanding lurus dengan tingkat melek huruf latin. Masih ada sebagian pendududuk yang masih belum melek huruf dikarenakan himpitan ekonomi memaksa mereka lebih mementingkanusaha pemenuhan kebutuhan hidup daripada peningkatan sumberdaya manusia.

Selain itu sebagian besar dari mereka sudah termasuk usia lansia sehingga sulit untuk mengikuti pembelajaran disamping mereka menganggap bahwa melek huruf tidak merupakan kebutuhan inti untuk menjalani kehidupannya.

1.5.2 Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Menjadi seorang guru tidaklah mudah. Tidak semua orang bisa menjadi guru, karena guru saat ini haruslah memiliki standar kompetensi yang dapat menjadikan dunia pendidikan lebih bermutu dan berkualitas. Belum semua guru memiliki seluruh standar kompetensi. Hal ini akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan dan jika kondisi ini tetap berlangsung maka kondisi mutu pendidikan lama kelamaan akan menjadi terpuruk. Standar kompetensi dimaksud adalah:

- Kompetensi Pedagogik merupakan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Adapun kompetensi pedagogik meliputi: Mengenal anak didiknya, menguasai teori-teori tentang pendidikan, bahan pelajaran, macam-macam teknik dan metode pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) serta mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.

- Kompetensi Kepribadian ialah kemampuan individu atau personal yang mencerminkan kepribadian yang stabil, bijaksana, dewasa, berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya serta memiliki akhlak yang mulia. Kompetensi kepribadian ini berkemampuan dalam mengaktualisasikan diri sebagai pendidik yang disiplin, jujur, berwawasan luas, bertanggung jawab dan dapat menjadi sumber inspirasi posirif bagi para peserta didiknya.

- Kompetensi Sosial ialah kemampuan guru dalam melakukan komunikasi baik lisan, tulisan maupun perbuatan kepada peserta didik, tenaga-tenaga kependidikan, wali

murid, maupun masyarakat sekitar dengan cara yang efektif, ramah atau santun dan sesuai dengan adat dan norma yang berlaku. Selain itu, dalam kompetensi sosial ini, guru mampu bekerjasama dan beradaptasi dengan keanekaragaman suku dan budaya di tempat melaksanakannya tugas.

- **Kompetensi Profesional** merupakan kemampuan dalam penguasaan materi pembalajaran secara mendalam dan luas. Tidak hanya penguasaan materi pelajaran saja, namun juga penguasaan terhadap materi-materi kurikulum yang berlaku, konsep dan struktur keilmuan, masalah-masalah pendidikan dan wawasan yang memadai terhadap materi-materi yang bersangkutan.

1.5.3 Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Cirebon masih belum terpenuhi atau belum memenuhi SPM Pendidikan. Selain itu kondisinya sudah banyak yang rusak dimakan usia dan diperparah dengan pendistribusiannya yang belum merata.

Mestinya salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, bahwa kualitas pendidikan tersebut juga di dukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Misalnya saja sekolah yang berada di kota yang sudah memiliki faslitas laboratorium komputer, maka anak didiknya secara langsung dapat belajar komputer sedangkan sekolah yang berada di desa tidak memiliki fasilitas itu dan tidak tahu bagaimana cara menggunakan komputer kecuali mereka mengambil kursus di luar sekolah.

1.5.4 Manajeman Pengelolaan Pendidikan

Tidak ada perbuatan yang sempurna, begitupun tidak ada perbuatan positif yang sia-sia. Sama halnya dengan upaya peningkatan tatakelola pendidikan di Kabupaten Cirebon, meski terus menerus diadakan perbaikan namun kekurangan masih tetap ada baik penyebabnya dari internal maupun eksternal. Dana pendidikan misalnya dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ditetapkan 20% namun Pemerintah

Kabupaten belum mampu merealisasikannya. Ada yang beranggapan bahwa sekolah dijadikan ladang bisnis dan sebagainaya.

Penerapan tata kelola yang baik membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan, diantaranya:

1. Mampu memberi ruang kepada pihak di luar pemerintah, yaitu masyarakat, agar ikut berperan optimal sehingga tercipta sinergi antara lembaga pendidikan dengan stakeholdernya.
2. Penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik memberikan nilai-nilai, seperti nilai keadilan, efisiensi, dan daya tanggap, yang mendorong lembaga pendidikan maupun Pemerintah lebih efektif dalam bekerja tanpa mengabaikan orientasi pada kebutuhan pelanggan pendidikan.
3. Tata kelola kepemerintahan yang baik memberikan kondisi bersih dari korupsi yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekelompok orang atau golongan.

Untuk pelaksanaan tata kelola yang baik, diperlukan adanya:

1. Komitmen yang kuat baik dari pihak-pihak di dalam lembaga pendidikan tersebut maupun pihak-pihak di luar lembaga pendidikan seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat.
2. Koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral tinggi.
3. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata yang berakar pada penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab.

Penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan pendidikan dapat membangun sebuah sistem anti korupsi dalam institusi pendidikan yang akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa ini.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A Gambaran Umum Unit Kerja

Dalam gambaran umum unit kerja ini menerangkan tentang keadaan dinas pendidikan

B Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dinas pendidikan

C Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi disini membahas tengang:perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan; pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pra sekolah dan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, sarana dan prasarana serta fungsional; pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan Dinas; penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT Dinas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D Lingkungan Strategis

Memuat tentang lingkungan Strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal.

E Sistematika Penyajian

Tentang peyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan secara garis besar.

BAB II PERENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

A Visi - Misi

B Tujuan

C Sasaran Srategis

D Indikator Kinerja Utama (IKU)

B Penetapan Kinerja Tahun 2022

Membahas tentang penetapan kinerja tahun 2022 sebagai pedoman dalam menjalankan kinerja dibidang pendidikan di tahun 2022

BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA

A Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dimana pencapaian Sasaran tersebut diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran.

B Pengukuran dan dan Analisa Kinerja

Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya

C Pembandingan Capaian Kinerja

Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja tahunan yang direncanakan mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

D Akuntabilitas Keuangan

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

E Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran

BAB IV PENUTUP

B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mempunyai rencana strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2019 – 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2022 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2022.

A. VISI - MISI

V I S I

Visi Dinas Pendidikan mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Cirebon dan merupakan komitmen (keinginan dan cita-cita) segenap jajaran Pengelola dan Pemerhati Bidang Pendidikan di Kabupaten Cirebon. Visi tersebut merupakan kesimpulan dari hasil serangkaian pembahasan yang melibatkan unsur-unsur pengelola dan pemerhati pendidikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon.

Visi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pembangunan pendidikan dirumuskan dengan sepenuhnya memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi-kondisi nyata serta permasalahan pendidikan di Kabupaten Cirebon, dan untuk pencapaiannya harus dilakukan melalui penggalian, pengerahan dan pengembangan potensi-potensi bidang pendidikan yang ada agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sehingga berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon.

Keberhasilan pencapaian Visi dalam pembangunan di bidang pendidikan diukur dengan tingkat pencapaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang ditandai dengan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pencapaian IPM di Kabupaten Cirebon.

Pemikiran-pemikiran di atas menjadi dasar pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap dunia pendidikan dalam rangka pengelolaan pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Visi tersebut adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”**

M I S I :

Guna pencapaian visi tersebut diatas , Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya tradisi dan adat istiadat;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;
3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika;
4. Meningkatnya produktifitas masyakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
5. Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengampu pada misi ke 2 (dua) misi Kabupaten Cirebon yaitu “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi”

Adapun penjelasan misi tersebut terhadap pembangunan pada bidang Pendidikan di Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Pertama, Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik.

Tuntutan dunia global diantaranya layanan pendidikan yang bermutu. Kata bermutu diatas mengandung makna sangat kompleks seiring dengan kompleksnya peserta didik itu sendiri, karena salah satu tugas guru harus dapat memanusiakan manusia. Layanan pendidikan yang bermutu meliputi 1) Sumber Daya Manusia/SDM, 2) sarana prasarana serta 3) manajemen pendidikan.

SDM pendidikan atau guru menempati posisi sangat penting dalam menjembatani tranformasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan potensi siswa sesuiai bakat, minat yang dimiliki. Oleh karena itu agar terselenggaranya pendidikan yang bermutu, perlu adanya guru yang profesional ditandai dengan kualifikasi pendidikan S1, tersertifikasi, memiliki kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.

Kurikulum pendidikan dari waktu ke waktu mengalami perubahan sesuai perkembangan dan sebagai bentuk upaya penyempurnaan diberbagai bidang. Tahun 1947 disebut Rencana Pelajaran berkembang terus sampai pada tahun 1984 dinamakan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan terakhir tahun 2013 Kurkulum 2013 (KURTILAS) dan sekarang semenjak pandemic Covid 19, paradigman pendidikan di Indonesia mulai tahun 2021 dengan menggunakan Kurikulum Merdeka.

Begitu pentingnya sehingga kurikulum selalu mengalami perubahan dengan tujuan dapat memaksimalkan hasil pendidikan dengan cara menjalankannya sesuai aturan dan kabijakan yang telah ditetapkan.

Kedua, Meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten.
Salah satu penentu kegiatan pembelajaran adalah guru. Kualitas guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses berlangsungnya pendidikan. Guru hendaknya memiliki kemampuan untuk membentuk manusia cerdas dalam memahami, mencerna dan melakukan berbagai hal, membentuk pribadi yang memiliki jati diri bangsa, sehingga kelak kemudian hari mampu mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai potensi yang dikuasai sehingga pembangunan pendidikan dapat terwujud dengan sempurna karena di isi oleh generasi muda yang berkualitas.

Selain kualifikasi guru, jumlah gurupun hendaknya mencukupi untuk semua jenjang pendidikan. Rasio guru SD sama dengan 1 orang guru berbanding 1 rombongan belajar, untuk jenjang SMP, 24 jam pelajaran tersedia 1 orang guru serta pelajaran yang diampu sesuai dengan basic yang dimilikinya.

Ketiga, Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasaran pendidikan
Sarana prasarana untuk menunjang terselenggaranya layanan pendidikan juga sangat penting dan menentukan. Upaya untuk memenuhi sarana prasaran dengan melakukan pembengunan USB, ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan sekolah, alat peraga pendidikan dan lain-lain menuju tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai Kepmenpan nomor 25 tahun 2004.

Keempat, Meningkatkan tatakelola layanan pendidikan
Manajemen pendidikan tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolekting data saswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu realisasikan dalam kegiatan sehari-hari serta memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

B. TUJUAN

Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya ingin meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat. Melalui misinya yaitu ”Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi”.

Tujuan Rencana Jangka Menengah dalam Pembangunan Pendidikan (2019- 2024) tidak terlepas dari persolan pokok dalam pendidikan yakni (1) menjadikan semua anak bisa sekolah dan unggul dengan upaya 1) meningkatan aksesibilitas melalui daya tampung satuan pendidikan, 2) peningkatan mutu pendidikan dengan pemberdayaan sekolah, 3) pengelolaan tata kelola pendidikan yang baik di sekolah dan dinas pendidikan.

Semua anak bisa sekolah dan unggul membutuhkan peningkatan dari aspek aksesibilitas dan mutu pendidikan di sekolah. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui daya tampung satuan pendidikan dinilai sangat penting dikarenakan salah satu utama keberhasilan pembangunan pendidikan dapat tercapai ketika seluruh anak dengan usia sekolah baik TK/PAUD Regular (4- 5) tahun) SD (7-12 tahun), SMP (13 - 15 tahun) dan SMA/SMK (16 – 18 tahun) mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan. Upaya yang dilakukan :

1. **Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta didik**

   Meningkatkan kuantitas peserta didik adalah upaya secara terus menerus yang dilakukan melalui intensifikasi komunikasi formal maupun informal baik di tataran internal maupun eksternal kedinasan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Disamping itu upaya pemerataan dan perluasan akses dengan cara pengembangan model pendidikan baik formal maupun non formal. Untuk keberhasilan hal tersebut perlu dibangun tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan dan partisipasi dari semua komponen yang ada. Meningkatkan kualitas peserta didik adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus melalui inovasi pembelajaran sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang tinggi ditandai oleh tingkat pencapaian angka kelulusan, rendahnya angka mengulang dan lain - lain.

2. **Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan**

   Rendahnya mutu pendidikan dapat terlihat dari kualifikasi Guru serta Proses Pembelajaran yang berlangsung tidak sesuai dengan Standar Nasional sehingga hal ini juga mungkin merupakan salah satu penyebab rata-rata nilai hasil peserta didik US/UN SD dan SMP masih rendah.

   Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan adalah upaya yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pembinaan secara terus menerus baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan melalui pelatihan teknis pengelolaan pendidikan agar dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas kinerja serta memiliki integriras dan kompetensi unggul dalam rangka menciptakan masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif.

3. **Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan**

   Memenuhi standar nasional sarana dan prasarana adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang harus tersedia dalam rangka kegiatan belajar mengajar melaui pembangunan gedung kantor, sekolah, ruang kelas, laboratorium serta ruang penunjang lainnya, alat

bantu pembelajaran seperti buku teks pelajaran, alat peraga dan lain-lain baik secara kuantitas maupun kualitas.

4. **Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tatakelola pendidikan**

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasai oleh ruang dan waktu.

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasai oleh ruang dan waktu.

Pengertian Cerdas dan Kompetitif

Cerdas dan Komprehensif	
Multiple Intelegence	• Kecerdasan Verbal Beraktualisasi diri melalui kecerdasan menggunakan kata-kata dan bahasa untuk mengekspresikan makna, ide atau gagasan-gagasan. • Kecerdasan Matematis Beraktualisasi diri melaui kecerdasan penggunaan logika untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi serta operasi-operasi matematika. • Kecerdasan Visual Spasial Beraktualisasi melalui penggunaan kecerdasan olah bentuk dan ruang tiga dimensi. • Kecerdasan Kinestetis – Fisik Beraktualisasi melalui penggunaan kecerdasan olah fisik. • Kecerdasan Musikal Beraktualisasi melalui penggunaan kecerdasan sensitivitas terhadap pola titi nada, melodi, ritme dan nada. • Kecerdasan Inter – Personal Beraktualisasi diri melalui pemahaman dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain (Learning to life together). • Kecerdasan Intra – Personal

Cerdas dan Komprehensif	
	Beraktualisasi diri untuk memahami diri sendiri dan pengendalian diri untuk menumbuhkan/memperkuat keimanan dan ketaqwaan. • Kecerdasan Natural Beraktualisasi diri melalui kemampuan mengobservasi pola – pola alam dan memahami sistem alamiah atau sistem buatan manusia.
Kompetitif	• Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, bersahabat dengan perubahan, inovatif, menjadi agen perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi global, pembelajar sepanjang hayat.

Visi Pemerintah Kabupaten Cirebin dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan di era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan pada masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).

Di dalam masyarakat berbasis pengetahuan, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dominan. Masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih rendah belum secara optimal memanfaatkan Iptek sebagai penggerak utama (*prime mover*) perubahan masyarakat. Pendidikan memfasilitasi peningkatan indeks teknologi tersebut, namun demikian, peningkatan indeks teknologi tidak semata-mata ditentukan oleh pendidikan, melainkan juga oleh transfer teknologi yang biasanya menyertai investasi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus sinkron dengan kebijakan investasi.

Untuk itu, pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan gerak perkembangan ilmu pengetahuan modern dan inovasi teknologi maju, sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman. Pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan mencerahkan, serta proses pendidikan yang kreatif.

Pendidikan juga menciptakan kemandirian baik pada individu maupun bangsa. Pendidikan yang menumbuhkan jiwa kemandirian menjadi sangat penting justru ketika dunia dihadapkan pada satu sistem tunggal yang digerakkan oleh pasar bebas. Bangsa Indonesia sulit bertahan jika tidak memiliki kemandirian karena hidupnya semakin tergantung pada bangsa-bangsa yang lebih kuat. Selain itu, pendidikan harus menjadi bagian dari proses perubahan

bangsa menuju masyarakat madani, yakni masyarakat demokratis, taat, hormat, dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan, melestarikan keseimbangan lingkungan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia

Motifasi merupakan alat pemicu untuk medapat suatu yang diharapkan. Tinggi rendahnya motifasi akan langsung berdampak pada tingkat keberhasilan dan prestasi peserta didik dalam berbagai hal. Motifasi perlu dipupuk setiap saat oleh pendidik, orang tua, masyarakat dan oleh peserta didik itu sendiri, karena motifasi tidak serta merta hadir tanpa ada penyebab, harapan dan cita-cita yang akan dicapai.

Motifasi belajar tidak hanya ditumbuh kembangkan pada peserta didik semata melainkan pada semua lini yang bersinggungan dengan pengelolaan pendidikan karena diantara keduanya dapat saling mempengaruhi dan saling memberi energi positif dalam rangka mengembangkan potensi diri secara maksimal.

Banyak kesempatan dan ruang waktu utuk membangkitkan semangat belajar bagi peserta didik baik pada saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar maupun dalam kesempatan lain dalam situasi formal maupun nonformal. Kebersamaan yang intensif antara peserta didik denga pendidik melahirkan situasi yang strategis untuk memompa motifasi belajar siswa sehingga dapat mengasah kecerdasan sebagai modal dasar bagi keberhasilan yang lebih besar pada masa yang akan datang.

Bermacam-macam cara dapat digunakan untuk meningkatkan motifasi belajar peserta didik, dapat secara langsung maupun tidak langsung, pada saat sendiri ataupun berkelompok. Sering motifasi belajar timbul setelah peserta didik melihat, mendengar ataupun merasakan sendiri sesuatu hal yang dapat merubah sikap mental dalam memberikan apresiasi terhadap pentingnya kecerdasan bagi seseorang dalam meningkatkan taraf hidup sehingga dapat bersaing pada era global.

C. SASARAN DAN STRATEGI

1. SASARAN

1.1 Meningkatnya Kemempuan Membaca

Membaca merupakan salah satu keterampilan dasar yang paling utama dalam pendidikan. Hal tersebut dikarenakan dalam memahami pesan yang disampaikan sebuah tulisan, keterampilan membaca sangat diperlukan.

Keterampilan membaca siswa merupakan dasar yang menjadi penentu keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Siswa yang tidak mampu membaca dengan baik seringkali mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Hal tersebut dikarenakan dalam menangkap dan memahami informasi yang terdapat dalam buku-buku pelajaran, ataupun sumber-

sumber penunjang belajar lainnya siswa harus mampu membaca dengan baik. Masih banyak siswa pada satuan pendidikan yang belum lancar membaca, bahkan sama sekali belum bisa membaca dengan baik hal ini tentu saja merupakan sebuah permasalahan yang harus segera ditangani dan mendapat perhatian berbagai pihak.

Salah satu program dalam meningkatkan Keterampilan membaca siswa adalah adanya Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang menjadi populer semenjak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Program Peningkatan Keterampilan Membaca melalui Program Klinik Baca adalah sebagai berikut:

1. Memberikan fasilitasi kepada siswa yang memiliki kendala dalam keterampilan membaca;
2. Memeberikan motivasi kepada siswa agar memiliki keinginan dan kemauan untuk meningkatkan keterampilan membaca;
3. Terwujudnya Program Melek Huruf melalui Klinik Baca bagi siswa SMP di Kabupaten Cirebon (tujuan jangka menengah/1 tahun)
4. Terlaksananya Program Gerakan Literasi Sekolah melalui Klinik Baca bagi siswa SMP di seluruh sub rayon (gugus) Kabupaten Cirebon sesuai standar membaca pemahaman dengan Kecepatan Efektif Membaca (KEM) mencapai 140 – 175 KPM (tujuan jangka panjang/2 tahun);

1.2 Meningkatnya Akses Pendidikan Yang Meluas Dan Merata

Semua anak bisa sekolah dan unggul membutuhkan peningkatan dari aspek aksesibilitas dan mutu pendidikan di sekolah. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui daya tampung satuan pendidikan dinilai sangat penting dikarenakan salah satu factor utama keberhasilan pembangunan pendidikan dapat tercapai ketika seluruh anak dengan usia sekolah baik TK/PAUD Regular (4- 5) tahun) SD (7-12 tahun), SMP (13 - 15 tahun) dan SMA/SMK (16 – 18 tahun) mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan.

Perluasan dan pemerataan Akses Pendidikan merupakan upaya perluasan daya tampung satuan Pendidikan dengan mengacu kepada skala prioritas dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh penduduk Kabupaten Cirebon dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda. Selain itu beasisawa transisi, dana Bos sangat menunjang dan meningkatkan perluasan akses ini.

1.3 Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan

Sudah merupakan pendapat umum bahwa kemakmuran suatu bangsa berkaitan erat dengan kualitas, mutu dan relevansi pendidikan bangsa yang bersangkutan. Bahkan lebih spesifik lagi, bangsa-bangsa yang berhasil mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dewasa ini adalah bangsa-bangsa yang melaksanakan pembangunan berdasarkan strategi pengembangan sumber daya insane. Artinya, melaksanakan pembangunan nasional dengan menekankan pada pembangunan pendidikan guna pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Begitupun di Kabupaten Cirebon upaya pengembangan sumber daya manusia, dari aspek pendidikan yang berarti mengembangkan pendidikan baik aspek kuantitas maupun kualitas. Aspek kuantitas menekankan pada perluasan sekolah sehingga penduduk memilki akses untuk bisa mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Dari aspek kualitas , pengembangan sumber daya manusia berarti pendidikan dalam hal ini kualitas sekolah harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kualitas sekolah memiliki tekanan bahwa lulusan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki kemampuan yang relevan dan diperlukan dalam kehidupannya.

Salah satu penentu kegiatan pembelajaran adalah guru. Kualitas guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses berlangsungnya pendidikan. Guru hendaknya memiliki kemampuan untuk membentuk manusia cerdas dalam memahami, mencerna dan melakukan berbagai hal, membentuk pribadi yang memiliki jati diri bangsa, sehingga kelak kemudian hari mampu mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai potensi yang dikuasai sehingga pembangunan pendidikan dapat terwujud dengan sempurna karena di isi oleh generasi muda yang berkualitas.

Selain kualifikasi guru, jumlah gurupun hendaknya mencukupi untuk semua jenjang pendidikan. Rasio guru SD sama dengan 1 orang guru berbanding 1 rombongan belajar, untuk jenjang SMP 24 jam pelajaran tersedia 1 orang guru serta pelajaran yang diampu sesuai dengan basic yangdi milikinya.

Sarana prasarana untuk menunjang terselenggaranya layanan pendidikan juga sangat penting dan menentukan. Upaya untuk memenuhi sarana prasaran dengan melakukan pembengunan USB, ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan sekolah, alat peraga pendidikan dan lain-lain menuju tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai Kepmenpan nomor 25 tahun 2004.

1.4 Meningkatnya Efektifitan dan Efisiensi Pengelolaan Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolekting data saswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu realisasikan dalam kegiatan sehari-hari serta memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

1.5 Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pendidikan

Tata Kelola Pendidikan merupakan bagian manajemen dalam pengelolaan pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari pengelolaan yang efisien, akuntabel dan transparan baik di Sekolah maupun di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Oleh karenanya Tata kelola pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Tata Kelola Pendidikan di dalam kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mempunyai andil yang penting dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen organisasi. Efisiensi dari pengelolaan manajemen dapat dibantu dengan adanya sistem IT terintegrasi yang bisa memudahkan akses data serta menjembatani antara sekolah dan dinas pendidikan melewati satu jalur. Dengan demikian kemudahan sistem dan perolehan data untuk pengelolaan sekolah dari dinas pendidikan dapat berjalan dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Sasaran strategis tata kelola dinas pendidikan yang profesional dan akuntabel (reformasi birokrasi) meliputi:

a. SAKIP Dinas Pendidikan
b. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan yang professional
c. Monitoring & Evaluasi Pengendalian SNP
d. Sistim Informasi Manajeman Dinas Pendidikan pengelolaan data.
e. Pengelolaan anggaran dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. STRATEGI

Strategi merupakan upaya langkah yang dilakukan secara sistermatis guna mencapai tujuan serta sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan pendidikan. Strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tetap mengerucut pada tiga hal yakni Peningkatan Aksesbilitas Pendidikan, Mutu Pendidikan serta Tata Kelola Pendidikan yang akuntabel dan transparansi.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2019—2024 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis RPJMD Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2018. Strategi dan arah

kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals* (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development.*

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2019--2024 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan khususnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan. Kebutuhan tersebut mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keterjangkauan atau pendanaan, pembelajaran dan penilaian, dan tata kelola manajemen pendidikan.

2.1 STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Strategi guna mencapai Aksesbilitas pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan layanan akses pendidikan jenjang Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP serta memberikan kemudahan aksesibilitas bagi siswa yang tidak mampu. Kebijakan yang dapat diambil yakni dengan membangun Unit Sekolah Baru (USB) di daerah yang membutuhkan, terutama bagi daerah yang memiliki rasio sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah tidak sebanding maupun wilayah pelosok, merevitalisasi Ruang Kelas Baru agar dapat menampung siswa, memberikan bantuan operasional siswa berupa BOS, membebaskan iuran bulanan peserta didik TK, SD dam SMP Negeri dan membantu meringankan iuran bulanan peserta didik yang kurang mampu, menyedikan pembelajaran Jarak Jauh dengan menambah SMP Tebuka serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan PKBM untuk jenjang pendidikan non formal (Kesetaraan Paket A, B dan C).

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu

2.1.1. Peningkatan dan penguatan layanan mutu pendidik

Strategi peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas mutu Guru/Pengawas/Kepala Sekolah secara merata, dan mengembangkan pendidikan karakter.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Apabila diamati secara seksama, Guru Negeri (PNS) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada jenjang TK, SD, SMP terdapat kekurangan. Selain itu tidak meratanya sebaran guru menambah parah gap antara sekolah yang satu dengan lainnya.

Strategi yang dibangun dalam mengatasi kesenjangan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan adalah membangun strategi pelayanan untuk pendidikan jalur formal/non formal sebagai berikut.

a) Penyediaan tenaga pendidik yang berkompeten merata di seluruh wilayah kabupaten Cirebon meliputi pemenuhan guru TK, SD, SMP, serta tutor Paket A, Paket B dan Paket C yang berkompeten;

b) Penyediaan manajemen TK, SD, SMP, SMA, SMK serta Paket A, Paket B dan Paket C yang berkompeten merata di seluruh wilayah kabupaten Cirebon meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi;

c) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu, serta keterlaksanaan akreditasi;

d) Pengangkatan Guru Honor menjadi Guru PPPK melaluli program pengangkatan dari Pemerintah Pusat (Kemendikbud Riset dan TekhnologI)

d) Penyediaan dana BOS serta subsidi lainnya untuk meningkatkan keterjangkauan layanan.

Guru berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Berhasil atau tidaknya tergantung pada bagaimana guru memahami komponen-komponen yang terkait langsung dengan proses pembelajaran itu sendiri diantaranya:

a) Tujuan Pembelajaran

Langkah pertama proses belajar mengajar ialah penentu tujuan. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai siswa setelah menyelesaikan suatu konsep pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran umum telah ditulis dalam Garis-Baris Besar Program Pengajaran (GBPP). Komponen tujuan pembelajaran adalah suatu tahap kegiatan belajar mengajar yang turut memecahkan problem pengajaran.

b) Murid

Murid adalah orang yang melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Murid dalam suatu kelompok harus memiliki karakteristik yang relatif sama. Untuk penentuan karakteristik lazim digunakan empat teknik penentukan karakteristik siswa, mengkaji dokumen, tes, wawancara, dan observasi.

c) Guru

Guru adalah orang yang menggerakkan suatu proses belajar. Tanpa profesionalisme suatu proses belajar mengajar tidak mungkin mencapai hasil yang baik. Keberadaan guru yang profesional mutlak menjadi dasar pengembangan sistem pembelajaran.

d) Konsep Pembelajaran

Konsep pembelajaran mengandung berbagai materi pembelajaran yang harus dikaji warga belajar. Dengan menguasai sejumlah konsep pembelajaran berarti siswa memiliki modal untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Konsep pembelajaran harus dikembangkan jadi bahan pembelajaran yang memungkinkan warga belajar memperoleh macam-macam materi pembelajaran yakni fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Dengan adanya pengembangan bahan pembelajaran yang teruji memungkinkan proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik.

e) Pendekatan/Metode/Teknik

Pendekatan berupa suatu pendapat tentang pengajaran bahasa yang didasari falsafah tentang bahasa dan pengajaran bahasa, seperti pendekatan komunikatif dan pendekatan alamiah. Teknik pembelajaran digunakan untuk mengurutkan setiap langkah kegiatan. Teknik yang dapat digunakan seperti pemberian, penjelasan, diskusi. Pendekatan dan metode maupun teknik merupakan subsistem yang digunakan dalam pembelajaran.

f) Media/Alat peraga

Penyampaian materi pembelajaran memerlukan media suatu alat. Alat yang digunakan dalam pembelajaran disebut media belajar (alat peraga). Alat ini digunakan hanya untuk membantu memperjelas siswa kepada hal-hal yang memang belum jelas. Media membentuk warga belajar terhindar dari verbalisme, karena sesuatu yang dikatakan ditunjukan dengan bendanya atau tiruannya.

g) Evaluasi

Evaluasi digunakan untuk mengukur kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) warga belajar setelah mengkaji konsep pembelajaran. Evaluasi yang dilaksanakan dapat berupa evaluasi lisan, evaluasi tulisan, dan evaluasi perbuatan. Evaluasi dapat dilaksanakan dengan pertanyaan tulisan yang di jawab dengan lisan, atau pertanyaan lisan dijawab dengan lisan. Evaluasi tulisan diharapkan warga belajar menjawab dengan tulisan. Evaluasi perbuatan menekankan warga belajar untuk melakukan suatu kegiatan berupa motorik (gerak), seperti mengekpresikan suatu adegan bagian drama, menunjukkan perilaku senang/susah/sedih, dan sebagainya.

2.1.2. Peningkatan akses layanan pendidikan

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan murah dan berkualitas merupakan mandat sesuai tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan Pasal 31 Ayat (1) mengamanatkan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 ayat (1) dan (2) menegaskan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Strategi guna mencapai Aksesbilitas pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan layanan akses pendidikan jenjang Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP serta memberikan kemudahan aksesibilitas bagi siswa yang tidak mampu. Kebijakan yang dapat diambil yakni dengan membangun Unit Sekolah Baru (USB) di daerah yang membutuhkan, terutama bagi daerah yang memiliki rasio sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah tidak sebanding maupun wilayah pelosok, merevitalisasi Ruang Kelas Baru agar dapat menampung siswa, memberikan bantuan operasional siswa berupa BOS, membebaskan iuran bulanan peserta didik TK, SD dam SMP Negeri dan membantu meringankan iuran bulanan peserta didik yang kurang mampu, menyedikan pembelajaran Jarak Jauh dengan menambah SMP Tebuka serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan PKBM untuk jenjang pendidikan non formal (Kesetaraan Paket A, B dan C).

2.1.3. **Peningkatan Infrastruktur Pendidikan**

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki infrastruktur/sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Satu Desa/Kelurahan dilayani minimal satu satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), serta dalam satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Luas lahan yang harus tersedia untuk satuan pendidikan SD dengan 6 Rombngan Belajar (Rombel) bangunan lantai satu adalah 1.340 m2, sedangkan luas bangunan minimal 400 m2.

Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP yang dapat menampung semua lulusan SD di kecamatan tersebut serta satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Luas lahan yang harus tersedia untuk satuan pendidikan SMP dengan 3 Rombngan Belajar (Rombel) bangunan lantai satu adalah 1.440 m2, semakin banyak jumlah rombel semakin bertambah luas lahan yang mesti disediakan sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan luas bangunan minimal 430 m2 untuk bangunan lantai satu, dan semakin besar jumlah rombel semakin luas pula bangunan yang mesti disediakan.

2.1.4 Peningkatan layanan tatakelola pendidikan

Manajemen pendidikan tidak kalah penting dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolekting

data siswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu direalisasikan dalam kegiatan sehari-hari serta memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

Layanan data dan informasi adalah bagian yang tak kalah pentingnya bagi terwujudnya tata kelola yang efektif dan efisien diantaranya melalui proses kolekting data, pengolahan data, produksi data dan pendayagunaan data. Seiring dengan laju perkembangan teknologi informasi, proses tersebut tidak hanya dilakukan dengan cara manual, tetapi mau tidak mau harus memanfaatkan teknologi melalui pembangunan sistem layanan data dan informasi serta meningkatkan sumber daya manusia dilingkungan Dinas Pendidikan sehingga sistem layanan tersebut teraji dengan sempurna sesuai harapan.

2,1,5, Peningkatan Tata Kelola Dinas Pendidikan yang Profesional dan Akuntabel

Stategi yang diterapkan rancangan kegiatan yang bersifat sistematis guna mendukung secara teknis kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang. Kegiatan tersebut mendukung sasaran strategis utama yang diantaranya meningkatkan aksesibilitas Pendidikan (Aksesbilitas), pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan (Mutu Pendidikan), dan tata kelola Dinas Pendidikan yang profesional anakuntabel (Reformasi Birokrasi).

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	**Meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat**		Meningkatnya Angka Capaian Indeks Pendidikan	23,54 Poin	23,74	23,92	24,38	24,70
1.1.1.		Meningkatnya kemampuan membaca	Angka Melek Huruf	96,00 Prosen	96,58	97,16	97,74	98,32
			Tingkat Capaian Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa	76,00 Prosen	76,46	76,91	77,38	77,84
1.1.2.		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan	Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,78 Tahun	6,88	6,98	7,08	7,18
1.1.3.		Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,52 Tahun	12,67	12,82	12,97	13,12
1.1.4.		Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan	Manajeman Bebasisa Sekolah	100,00 Prosen	100,00	100,00	100,00	100,00
			Indek Kepuasan Masyarakat	78,30 Point	78,35	78,42	78,45	78,50
			Harapan Lama Sekolah	12,52 Prosen	12,67	12,82	12,97	13,12
1.1.5.		Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan	1. Pemenuhan Dukungan Manajeman Perkantoran : a. Dokumen Perencanaan b. Laporan Kinerja dan Keuangan c. Dokumen Data dan Informasi yang Valid	6,00 Dokumen	6,00	6,00	6,00	6,00
			Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persentasi Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran)	100,00 Prosen	100,00	100,00	100,00	100,00
			Pemenuhan Saran dan Prasarana Aparantur (Persentasi Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik)	100,00 Prosen	100,00	100,00	100,00	100,00

E. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON ESELON II (PIMPINAN SKPD)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Su mber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat	Meningkatnya Angka Capaian Indeks Pendidikan		Non Kumulatif	Meningkat	BPS dan Diskominfo	23.92 Poin	23.92 Poin
1.1.01.	Meningkatnya kemampuan membaca	Angka Melek Huruf	*Jml. Penduduk (usia diatas* 15 tahun) yang b/sa *menulis* ^qq *Jml. Penduduk usia* 15 *tahun ke atas*	Non Kumulatif	Meningkat	BPS / Infokom	97.16 Prosen	97.16 Prosen
1.1.02.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan	Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	*(thn) RLS - us.a > 15 Th X Lama Pendidikan yong dihabiskan')* xiOO *Jml. Penduduk* > 15 *Th Yang sedang bersekolah atau telah beriijazah * *)*	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Pendidikan	7.18 Tahun	7.18 Tahun
1.1.03.	Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	n' = °Pf	Non Kumulatif	Meningkat	BPS, Disdik dan Disdukcapil	12.82 Tahun	12.82 Tahun
1.1.04.	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan	Manajeman Bebasisa Sekolah	*Jml. Sekolah Yang Menerapan MBS ^..nn MdS* XI UU *Jml. Sekolah yang ada*	Non Kumulatif	Meningkat	Disdik	100 Prosen	100 Prosen
		Indek Kepuasan Masyarakat	*, Jml. Total dari persepsi nilai perunsur „ ,n . , IKM =----------,,5,. - ----------X Nilai Penimbang Total Nilai yang tensi*	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Pendidikan	78.42 Point	78.42 Point
1.1.05.	Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan	1. Pemenuhan Dukungan Manajeman Perkantoran : a. Dokumen Perencanaan b. Laporan Kinerja dan Keuangan c. Dokumen Data dan Informasi yang Valid		Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Pendidikan	6 Dokumen	6 Dokumen
		Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persentasi Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran)		Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Pendidikan	100 Prosen	100 Prosen
		Pemenuhan Saran dan Prasarana Aparantur (Persentasi Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik)		Non Kumulatif	Meningkat		100 Prosen	100 Prosen

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	74.445.200,00	74.445.200,00	Sumber Dana: DTU-DAU
No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	26.001.002.300,00	282.076.113.800,00	Sumber Dana: DAK Non Fisik-BOP PAUD, PBBP2,DAK Non Fisik-BOS Reguler, PBBP2,DID, DTU-DAU,DTU-DAU
1.1.02.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	112.044.400,00	112.044.400,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	31.839.263.900,00	61.953.630.700,00	Sumber Dana: BanKeu Prov, DAK Fisik B.Pddk Reg-SD, DID, DTU-DAU, Pjk Restoran,BanKeu Prov, DAK Fisik B.Pddk Reg-SMP, DTU-DAU,BanKeu Prov, DTU-DAU,DAK Fisik B.Pddk Reg-SD, DTU-DAU,DAK Fisik B.Pddk Reg-SD, DTU-DAU, Pjk Restoran,DAK Fisik B.Pddk Reg-SMP, DTU-DAU,DTU-DAU
1.1.03.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	120.011.200,00	120.011.200,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	921.763.800.405,00	979.331.440.851,00	Sumber Dana: DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD, DAK Non Fisik-TPG PNSD, DTU-DAU, PAD,DTU-DAU
1.1.04.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.021.724.100,00	931.924.100,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.04.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	957.659.900,00	416.684.700,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.788.565.660,00	5.531.186.860,00	Sumber Dana: DTU-DAU,DTU-DAU, DTU-DBH,DTU-DAU, Pjk Pen Jln
J U M L A H		**986.678.517.065,00**	**1.330.547.481.811,00**	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab atas kebutuhan informasi perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Pendidikan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Cirebon melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Dinas Pendidikan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2022.

A. Kerangka Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dimana pencapaian Sasaran tersebut diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Adapun hasil pengukuran kinerja (PK) dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja (PK).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- 100 keatas = Target Tercapai
- Dibawah 100 = Target Tidak Tercapai.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*).

Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

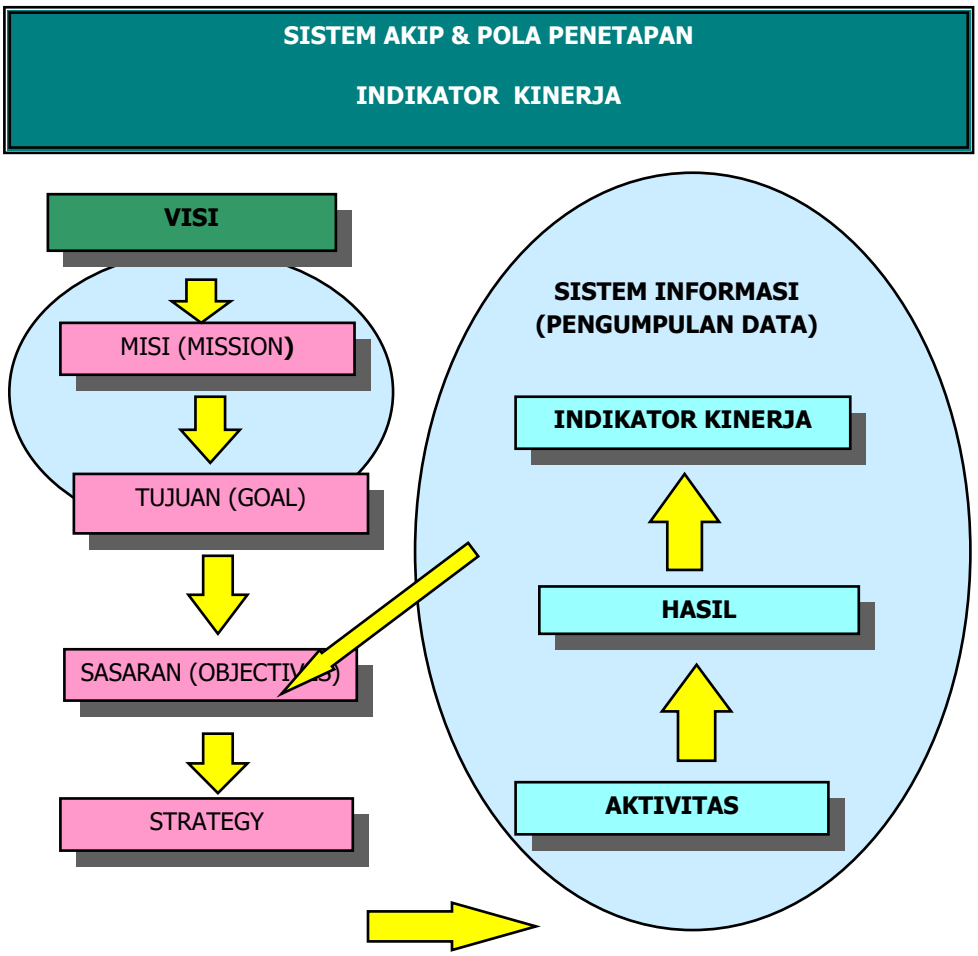

B. Pengukuran dan Analisis Kinerja

1. Ringkasan Kinerja

Kinerja yang telah dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berupa pencapaian sasaran, outcome dan kinerja utama sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan pada tahun 2019-2024 sebanyak 5 (Lima) buah sasaran dengan 9 (Sembilan) indikator, 4 (Empat) Outcome dengan 36 (Tiga Puluh Enam) indikator dan Kinerja Utama sebanyak 4 (Empat) dengan 4 (Empat) indikator, yang terinci sebagai berikut :

- 32 target tercapai
- 17 target tidak tercapai

Pada tahun anggaran 2022 sebanyak 4 sasaran telah dilaksanakan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan tahun 2022 baik. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi / tidak dapat menyesuaikan dengan alokasi waktu yang disediakan oleh Provinsi. Disamping itu masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan seperti masih rendahnya mutu pendidikan, kualitas maupun kwantitas tenaga pendidik, sarana prasarana serta biaya pendidikan belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran (Pengukuran Pencapaian Kegiatan /PPK)

2. Rincian Kinerja

2.1 SASARAN

a. MENINGKATNYA KEMAMPUAN MEMBACA

Meningkatnya Kemampuan Membaca ditandai dengan tingkat Capaian Angka Melek Huruf Latin dan Capaian Melek Huruf Al-Qur’an Siswa.

Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

1) CAPAIAN ANGKA MELEK HURUF LATIN

No.	Penjelasan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Jml. Penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa me nulis dibagi Jml. Penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100	97,16	99,78	102,70
	Jml. Rata-rata	97,16	99,78	102,70

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2022/2023

Target Angka Melek Huruf Latin pada tahun 2022 sebesar 97,16% dengan realisasi mencapai 99,78%. dari Jumlah Penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja baik atau tercapai hal ini ditunjang dengan Program Pendidikan Non Formal dengan menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional yang dikelola oleh masyarakat melalui lembaga PKBM dengan warga belajar penduduk yang buta aksara.

2) CAPAIAN ANGKA MELEK HURUF AL-QUR'AN SISWA

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	SD	76,91	78,29	101,79
2	SMP	76,91	86,28	112,18
	Jml. Rata-rata	76,91	82,29	106,99

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2022/2023

Target Melek Huruf Al-Qur’an Siswa SD pada tahun 2022 sebesar 76,91 % dengan realisasi mencapai 78,29 %. Dari jumlah siswa SD sebanyak 198.798 siswa. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja baik atau Tercapai dikarenakan adanya Program Pemerintah Kabupaten Cirebon Gerakan Maghrib Mengaji (GEMMAR) Mengaji dan disetiap sekolah diterapakan program mengaji setiap pagi selama 20 menit sebelum kegiatan belajar dilaksanakan.

Target Melek Huruf Al-Qur'an Siswa SMP sebesar 76,91 % dengan realisasi mencapai 86,28 % dari jumlah seluruh siswa SMP sebanyak 81.011 siswa. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja baik Atau Tercapai dikarenakan adanya Program Pemerintah Kabupaten Cirebon Gerakan Maghrib Mengaji (GEMMAR) Mengaji. dan disetiap sekolah diterapakan program mengaji setiap pagi selama 20 menit sebelum kegiatan belajar dilaksanakan.

b. MENINGKATNYA AKSES PENDIDIKAN YANG MELUAS DAN MERATA

Meningkatnya Akses Pendidikan Yang Meluas Dan Merata ditandai dengan tingkat Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 1 (Satu) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

1) CAPAIAN ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

No.	Penjelasan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	(thn) RLS=Jml. Penduduk usia >15 Th X Lama Pendidikan yang dihabis kan dibagi Jml. Penduduk >15 Th Yang sedang bersekolah atau telah beriijazah dikali 100	7,18	7,40	103,06
	Jml. Rata-rata	7,18	7,40	103,06

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2022/2023

Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan variabel RLS menggunakan angka usia penduduk yang berumur 25 tahun keatas yang memiliki ijazah terakhir atau tingkat pendidikan terakhir. Target Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2022 sebesar 7,18 tahun dengan realisasi capaian rata-rata Kabupaten sebesar 7,40 tahun, capain ini meningkat. Hal ini menggambarkan bahwa ada peningkatan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan capaian 7,10 tahun, hal ini karena adanya dukungan penyelenggaran pendidikan non formal Kelompok Belajar Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan

Paket C Setara SMA dan merupakan program prioritas dalam mendongkrak peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

c. MENINGKATNYA MUTU DAN RELEFANSI PENDIDIKAN

Peningkatan mutu, relefansi pendidikan ditandai dengan Angka Harapan Lama Sekolah, Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 1 (Delapan) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

1) ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan variable yang berpengaruh terhadap dimensi pendidikan, yang didefinisikan sebagai lamanya bersekolah (dalam tahun). Harapan Lama Sekolah (HLS). Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 memiliki nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,28. Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yaitu 12,25. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2021 12,27 menunjukan bahwa masyarakat di Kabupaten Cirebon memiliki harapan bersekolah sampai 12 tahun atau setara dengan tamat SMA, hal ini sesuai dengan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah. *Sumber data BPS Kabupaten Cirebon*

d. MENINGKATNYA EFEKTIFITAS DAN EFESIENSI PENGELOLAAN MANAJEMEN PENDIDIKAN

Tata Kelola Akuntabilitas dapat ditandai dengan adanya efisiensi internal sekolah dimana dapat digambarkan melalui pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS)

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh profesionalisme para pelaksana dalam mendorong terlaksananya manajerial yang tangguh dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi sehingga dapat mencapai hasil sesuai target. Manajemen berbasis sekolah merupakan hal yang tidak dapat dielakkan lagi mengingat saat ini di mana pendidikan sedang menjadi primadona dan menjadi sorotan hampir seluruh lapisan masyarakat sehingga

perlu dibangun transparansi di semua lini. Secara terperinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

1) INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

No	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	SD	100,00	82,45	82,45
2	SMP	100,00	82,42	82,42
	Jml.Rata-rata :	100,00	82,44	82,44

Target pencapaian IKM satuan pendidikan jenjang SD 100,00 Point sedangkan realisasinya mencapai 82,45 Point. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sudah baik atau tercapai.

Target pencapaian IKM satuan pendidikan jenjang SMP 100,00 Point sedangkan realisasinya mencapai 82,42 Point. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja baik atau tercapai.

2) MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	TK	100	100	100
2	SD	100	100	100
3	SMP	100	69,46	69,46
	Jml. rata-rata :	100	100	100

Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan sistem pengelolaan persekolahan yang memberikan kewenangan lebih luas kepada institusi sekolah untuk mengatur sekolah sesuai dengan potensi, kebutuhan dan tuntutan sekolah yang bersangkutan. Sekolah diberi otonomi yang luas dan bertanggungjawab untuk mengembangkan berbagai program sekolah dengan berbagai implikasinya untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Di Kabupaten Cirebon seluruh jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta telah melaksanakan MBS dengan baik meskipun masih

terus menerus perlu peningkatan kualitasnya. Dengan demikian diharapkan peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara maksimal dan menyeluruh.

e. MENINGKATNYA TATAKELOLA DINAS PENDIDIKAN

Tata Kelola Pendidikan merupakan bagian manajemen dalam pengelolaan pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari pengelolaan yang efisien, akuntabel dan transparan baik di Sekolah maupun di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Oleh karenanya Tata kelola pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Tata Kelola Pendidikan di dalam kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mempunyai andil yang penting dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen organisasi. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

1) PEMENUHAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN

No	Keterangan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Dok. Perencanaan	6,00	4,00	66,67
2	Laporan Kinerja dan Keuangan	6,00	1,00	16,67
3	Dok. Data dan Informasi Yang Valid	6,00	1,00	16,67
	Jml.Rata-rata :	6,00	2,50	41,67

2) PEMENUHAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

No	Keterangan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Persentasi Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	100,00	100,00
	Jml.Rata-rata :	100,00	100,00	100,00

3) PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

No	Keterangan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Persentasi Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100,00	100,00	100,00
	Jml.Rata-rata :	100,00	100,00	100,00

2.2 PROGRAM / OUTCOME

Hasil dan realisasi dari pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai penunjang pembangunan pada sektor pendidikan adalan berapa realisasi anggaran yang telah dipagukan untuk masing-masing kegiatan dan sub kegiatan, dan sejauh mana hasil capaian Output, dan Outcome dari Program dan kegiatan sebagai evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan, hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

No	KETERANGAN	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Peningkatan Persentase Masyarkat Melek Aksara	96,58	96,58	100
2	Angka partisipasi kasar PAUD/TK	100	52,71	52,71
3	Angka partisipasi kasar SD	100	100,42	100,42
4	Angka partisipasi kasar SMP	100	110,89	110,89
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100	90,68	90,68
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100	94,30	94,3
7	Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik jenjang SD	98,2	88,44	90,06

No	KETERANGAN	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
8	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik PAUD/TK	61,09	55,24	90,42
9	Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	90	69,86	77,62
10	Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik jenjang SMP	99,40	70,73	71,16
11	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah PAUD/TK	60	55,24	92,07
12	Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	70,08	77,09	110,00
13	Capaian Indek SPM Pendidikan Dasar yang terdiri dari unsur : 1. Ketersedian Ruang Kelas dengan Rasio : Jml rombel <= 32 siswa 2. Ketersediaan Guru Berizah S1 / D.IV 3. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100	91,40	91,4
14	Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang TK/PAUD	73,4	79,59	108,43
15	Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	81	78,27	96,63
16	Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan	75	75	100
17	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts	100	106,52	106,52
18	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100
19	Meningkatnya Angka Lulusan SMP/MTs	99,99	99,23	99,24
20	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SD	71,27	62,46	87,64

No	KETERANGAN	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
21	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SMP	81,5	76,36	93,69
22	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD	70	33,02	47,17
23	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SMP	70	64,73	92,47
	Jml.Rata-rata :	86,85	79,40	91,35

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

No	KETERANGAN	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Angka partisipasi kasar TK/PAUD	100	52,71	52,71
2	Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	90	69,86	77,62
3	Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	70,08	77,09	110,00
4	Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	81	78,27	96,63
5	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100,00

3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No	KETERANGAN	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SD	98,2	88,44	90,06

No	KETERANGAN	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
2	Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SMP	99,4	70,73	71,16
3	Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang TK/PAUD	73,4	79,59	108,43

4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

No	KETERANGAN	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efeltipitas dalam penyusunan laporan perencanaan	78,40	82,43	105,14
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	78,40	82,43	105,14
3	Peningkatan Mutu SDM dalam pelayanan terhadap masyarakat	78,40	82,43	105,14
4	Peningkatan Kedisplinan dan Mutu Pelayanan Aparatur terhadap masyarakat	78,40	82,43	105,14
5	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran	78,40	82,43	105,14

2.3. KINERJA UTAMA / KEGIATAN / OUTPUT

Dalam pelaksanaan beberapa Program Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan capaian kinerja seperti tersebut diatas, telah ditunjang dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian kinerja sebagai berikut :

a. PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

No	KETERANGAN	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Penduduk Usia sekolah SD dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	190.798	198.798	104,193

b. PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	KETERANGAN	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Penduduk Usia sekolah SMP dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	83.360	81.011	97,182

c. PENGELOLAAN PENDIDIKAN NON FORMAL / KESETARAAN

No	KETERANGAN	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Penduduk Drop out sekolah dapat melanjutkan pendidikan dan memiliki Ijazah kesetaraan	10.941	12.057	110,200

d. PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

No	KETERANGAN	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Penduduk Usia Pra Sekolah (Usia Dini) dapat mengikuti pengenalan pendidikan melalui pendidikan Pra Sekolah (TK / PAUD)	32.888	56.095	170,564

C. PEMBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 4 (empat) tahun yang direncanakan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada uraian dibawah ini

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI / SPM Standar Nasional		TARGET RENSTRA DINAS PENDIDIKAN (IKK)				REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI CAPAIAN		CATATAN ANALISIS
			TARGET 2021 (Tahun n-2)	TARGET 2022 (Tahun n-1)	TARGET 2023 (Tahun n)	TARGET 2024 (Tahun n+1)	Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	
(1)	SASARAN	INDIKATOR KUNCI								(12)
1	1.1.1.1.1.1. Meningkatnya kemampuan membaca	**1.1.1.1.1.1. Angka melek huruf**	**96,58%**	**97,16%**	**97,74%**	**98,32%**	**99,73%**	**97,16%**	**97,74%**	
		1.1.1.1.1.2. Angka melek huruf Al Qur'an								
		SD (%)	**76,46**				**76,46**			
		SMP (%)	**63,30**				**63,30**			
2	1.1.1.1.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan	**1.1.1.1.2.0. Angka Rata-rata Lama Sekolah**	**6,88**	**6,98**	**7,08**	**7,18**	**7,10**	**6,98**	**7,08**	
		1.1.1.1.2.1. Angka Partisipasi Kasar								
		APK PAUD %	**68,41**	**68,82**	**69,23**	**69,65**	**58,49**	**68,83**	**69,23**	
		APK SD/MI %	**100**	**100**	**100**	**100**	**99,53**	**100**	**100**	
		APK SMP/MTs %	**100**	**100**	**100**	**100**	**108,06**	**100**	**100**	
		1.1.1.1.2.2. Angka Partisifasi Murni								
		APM SD/MI %	100	100	100	100	90,53	100	100	
		APM SMP/MTs %	**98,89**	**99,49**	**100**	**100**	**87,83**	**99,49**	**100**	
		1.1.1.1.2.3. Rasio Ketersediaan Siswa per Kelas :								
		TK (%)	1:22	01:20	01:17	01:15	01:20	01:20	01:17	
		SD	**01:24**	**01:22**	**01:21**	**01:20**	**01:27**	**27**	**01:21**	

		SMP	**01:32**	**01:30**	**01:29**	**01:28**	**01:31**	**31**	**01:29**	
		1.1.1.1.2.3. Ketersediaan Lembaga Pendidikan Non Formal								
		PKBM	**80**	**90**	**95**	**100**	**75**		**95**	
		LKP	**70**	**80**	**85**	**100**	**91**		**85**	
3	1.1.1.1.3. Meningkatnya mutu dan relefansi pendidikan	**1.1.1.1.3.0. Angka Harapan Lama Sekolah**	**12,67**	**12,82**	**12,97**	**13,12**	**12,27**	**12,82**	**12,97**	
		1.1.1.1.3.1. Angka Putus Sekolah :								
		APS SD %	**0,01**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,01**	**0,00**	
		APS SMP %	**0,19**	**0,15**	**0,10**	**0,00**	**0,12**	**0,15**	**0,10**	
		1.1.1.1.3.2. Angka Lulusan :								
		SD (%)	100	100	100,00	100,00	99,3		100,00	
		SMP (%)	**99,98**	**99,99**	100,00	100,00	**97,58**	**99,99**	100,00	
		Paket A setara SD (%)	85	90,00	95,00	98,00	88,50	90,00	95,00	
		Paket B setara SMP (%)	70,04	70,04	71,30	71,70	88,00	70,04	71,30	
		Paket C setara SMA (%)	**80,5**	**81**	**81,40**	**81,90**	**88,89**	**81**	**81,40**	
		Lembaga Kursus dan Pelatihan (%)	100	100	100,00	100,00	100	100	100,00	
		1.1.1.1.3.3. Angka Melanjutkan :								
		SD ke SMP (%)	**100**	**113,32**	**100,00**	**100,00**	**113,32**	**113,32**	**100,00**	
		2.1.1.1.1.1. Guru Layak Mengajar :								
		TK %	**72,90**	**73,00**	**73,80**	**74,30**	**76,84**	**73,00**	**73,80**	
		SD (%)	**97,60**	**98,00**	**98,80**	**99,30**	**97,60**	**98,00**	**98,80**	
		SMP (%)	**98,80**	**99,00**	**100,00**	**100,60**	**98,50**	**99,00**	**100,00**	

		2.1.1.1.1.1. Rasio Guru per Siswa :								
		TK	1:15.7	01:10	01:10	01:10	01:11	01:10	01:10	
		SD	**20**	**20**	**20**	**20**	**01:21**	**20**	**20**	
		SMP	**20**	**20**	**20**	**20**	**01:16**	**20**	**20**	
		3.1.1.1.1.1. Ketersediaan Ruang Kelas Baik :								
		TK %	**60,72**	**61,09**	**61,45**	**61,82**	**93,20**	**61,09**	**61,45**	
		SD (%)	**70,84**	**71,27**	**71,70**	**72,13**	**64,58**	**71,27**	**71,70**	
		SMP (%)	**81,0**	**81,50**	**82,0**	**82,5**	**70,79**	**81,50**	**82,0**	
		3.1.1.1.1.2. Akreditasi Sekolah :								
		TK	**75,00**	**72,59**	**90,00**	**100,00**	**72,59**	**72,59**	**90,00**	
		SD (%)	**98,00**	**97,60**	**98,00**	**100,00**	**97,60**	**97,60**	**98,00**	
		SMP (%)	**88,00**	**89,80**	**90,00**	**100,00**	**89,80**	**89,80**	**90,00**	
4	1.1.1.1.4. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajeman pendidikan	**4.1.1.1.1.1. Indek Kepuasan Masyarakat :**								
		SD	**80,27**	**80,60**	**80,99**	**81,48**	**81,02**	**80,60**	**80,99**	
		SMP	**77,46**	**77,93**	**78,39**	**78,86**	**80,00**	**77,93**	**78,39**	
		4.1.1.1.1.2. Menajeman Berbasis Sekolah								
		PAUD (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
		SD (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
		SMP (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**69,46**	**100**	**100**	

Catatan : * SMA, SMK kewenangan Provinsi

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SKPD (IKK/IKU)
DINAS PENDIDIKAN
Periode: Sampai dengan bulan Desember 2022

No	Kode	Sasaran Kinerja Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Kinerja		Rasio (%)	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1.1.01.	**Meningkatnya kemampuan membaca**	74.445.200		74.252.600	99.74	
		(IKK/IKU)-Angka Melek Huruf (Non Kumulatif)	97.16 Prosen	99.780	99.780	102.70	
		(IKK/IKU)-Tingkat Capaian Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa (Non Kumulatif)	76.91 Prosen	78.030	78.030	101.46	
2	1.1.02.	**Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan**	282.188.158.20 0	107.097.202.733	274.320.857.998	97.21	
		(IKK/IKU)-Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Non Kumulatif)	7.18 Tahun	7.400	7.400	103.06	
3	1.1.03.	**Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan**	94.688.107.500	31.062.854.850	91.328.524.922	96.45	
		(IKK/IKU)-Harapan Lama Sekolah (HLS) (Non Kumulatif)	12.82 Tahun	12.280	12.280	95.79	
4	1.1.04.	**Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan**	980.680.049.65 1	131.761.160.109	938.037.561.001	95.65	
		(IKK/IKU)-Manajeman Bebasisa Sekolah (Non Kumulatif)	100 Prosen	69.460	69.460	69.46	
		(IKK/IKU)-Indek Kepuasan Masyarakat (Non Kumulatif)	78.42 Point	82.430	82.430	105.11	
		(IKK/IKU)-Harapan Lama Sekolah (Non Kumulatif)	12.82 Prosen	12.280	12.280	95.79	
5	1.1.05.	**Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan**	5.984.386.860	1.976.461.708	5.733.544.866	95.81	
		1. Pemenuhan Dukungan Manajeman Perkantoran : a. Dokumen Perencanaan b. Laporan Kinerja dan Keuangan c. Dokumen Data dan Informasi yang Valid (Non Kumulatif)	6 Dokumen	6.000	6.000	100	
		Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persentasi Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran) (Non Kumulatif)	100 Prosen	100.000	100.000	100	
		Pemenuhan Saran dan Prasarana Aparantur (Persentasi Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik) (Non Kumulatif)	100 Prosen	100.000	100.000	100	

Dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, berasal dari APBN, APBD Propinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022. Realisasi dana pada anggaran yang tersebut diatas tidak 100 % dikarenakan adanya sisa lelang dan efisiensi anggaran karena penyesuaian kebutuhan belanja.

E. INFORMASI KEUANGAN TERKAIT CAPAIAN SASARAN

Evaluasi dan Analisis Efesiensi dan Efektifitas Kegiatan

Dinas Pendidikan pada tahun 2022 telah melaksanakan berbagai kegiatan dari berbagai sumber anggaran, untuk mengukur kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dilakukan evaluasi dan analisis dengan efisiensi dan efektifitas dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran efesiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efesiensi} = \frac{\text{Realisasi Infut}}{\text{Realisasi output}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan antara outcome dengan outputnya baik rencana maupun realisasinya. Efektifitas umumnya ditandai dengan berfungsinya seluruh output pada tingkat outcome.

Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi outcome}}{\text{Realisasi output}} \times 100\%$$

Adapun standar pencapaian tingkat efesiensi dan efektifitas suatu kegiatan adalah sebagai berikut:

> 100% = Efesien/Efektif

< 100% = Inefesien/Inefektif

= 100% = Sesuai harapan

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAPORAN CAPAIAN PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN
Periode: Sampai dengan bulan Desember 2022

No	Kode	Nama Program Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Outcome		Rasio (%)	Penanggung Jawab	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	0.00.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	985.315.827.71 1	133.698.640.517	942.479.588.753	95.65	SUDIHARJO, SAP.; SUDIHARJO, SAP., M.Pd.	
		Indek Kepuasan masyarakat terhadap kualitas, efisiensi, dan efeltipitas dalam penyusunan laporan perencanaan (Non Kumulatif)	78.40 Point	82.43	82.43	105.14		
		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas, efisiensi, dan efektipitas dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah (Non Kumulatif)	100 Point	82.43	82.43	82.43		
		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap mutu dan kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Non Kumulatif)	78.40 Point	82.43	82.43	105.14		
		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Mutu SDM dalam pelayanan terhadap masyarakat (Non Kumulatif)	78.40 Point	82.43	82.43	105.14		
		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Kedisplinan dan Mutu Pelayanan Aparatur terhadap masyarakat (Non Kumulatif)	78.40 Point	82.43	82.43	105.14		
		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap kuantitas dan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran (Non Kumulatif)	78.40 Point	82.43	82.43	105.14		
		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan mutu pendidikan pada jenjang SD (Non Kumulatif)	80.60 Poin	82.43	82.43	102.27		
		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan mutu pendidikan	77.93 Poin	82.43	82.43	105.77		

		pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Non Kumulatif)						
2	1.01.02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	377.650.579.40 0	138.175.991.883	366.385.145.592	97.02	ADE KANDAR, S.Sos.; Drs. H. AMIN; Drs. HERRI PURNAMA; Drs. MUSTOPA; NOVI KOMALASARI, SSTP., M.Pd.	
		Angka partisipasi kasar (APK) PAUD/TK (Non Kumulatif)	100 Prosen	50.22	50.22	50.22		
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah PAUD/TK (Non Kumulatif)	60 Prosen	53.64	53.64	89.40		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat (Non Kumulatif)	100 Prosen	90.68	90.68	90.68		
		Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP (Non Kumulatif)	70.08 Prosen	77.09	77.09	110		
		Capaian Indek SPM Pendidikan Dasar yang terdiri dari unsur : 1. Ketersedian Ruang Kelas dengan Rasio : Jml rombel <= 32 siswa 2. Ketersediaan Guru Berizah S1 / D.IV 3. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) (Non Kumulatif)	100 Poin	91.34	91.34	91.34		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat (Non Kumulatif)	100 Prosen	94	94	94		

No	Kode	Nama Program Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Outcome		Rasio (%)	Penanggung Jawab	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA (Non Kumulatif)	81 Prosen	78.34	78.34	96.72		
		Penerapan Manajamen Berbasis Sekolah (Non Kumulatif)	100 Prosen	69.46	69.46	69.46		

		Tersedianya jumlah Lembaga Pendidikan Kecakapan Hidup (LKP) (Non Kumulatif)	75 Lembaga	91	91	121.33		
		Angka partisipasi kasar (APK) SD (Non Kumulatif)	100 Prosen	100.42	100.42	100.42		
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts (Non Kumulatif)	100 Prosen	106.52	106.52	106.52		
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI (Non Kumulatif)	100 Prosen	100	100	100		
		Meningkatnya Angka Lulusan SMP (Non Kumulatif)	99.99 Prosen	99.23	99.23	99.24		
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SD (Non Kumulatif)	71.27 Prosen	62.44	62.44	87.61		
		Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah : Kondisi Keadaan Ruang Kelas Baik SMP (Non Kumulatif)	81.50 Prosen	80.65	80.65	98.96		
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD (Non Kumulatif)	70 Prosen	25.46	25.46	36.37		
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SMP (Non Kumulatif)	70 Prosen	126	126	180		
		Peningkatan Persentase Masyarkat Melek Aksara (Non Kumulatif)	96.58 Prosen	99.78	99.78	103.31		
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik PAUD/TK (Non Kumulatif)	61.09 Prosen	96.20	96.20	157.47		
		Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD (Non Kumulatif)	90 Prosen	69.89	69.89	77.66		
		Angka partisipasi kasar (APK) SMP (Non Kumulatif)	100 Prosen	110.89	110.89	110.89		
3	1.01.03.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	232.055.600		232.055.600	100	ADE KANDAR, S.Sos.; Drs. HERRI PURNAMA; Drs.	

							MUSTOPA; NOVI KOMALASARI, SSTP., M.Pd.	
		Angka partisipasi kasar (Non Kumulatif)	68.82 Prosen	48.91	48.91	71.07		
		Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD (Non Kumulatif)	90 Prosen	69.86	69.86	77.62		
		Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP (Non Kumulatif)	70.08 Prosen	77.09	77.09	110		
		Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA (Non Kumulatif)	81 Prosen	78.27	78.27	96.63		
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI (Non Kumulatif)	100 Prosen	99.59	99.59	99.59		
4	1.01.04.	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	416.684.700	23.047.000	397.951.442	95.50	SUDIHARJO, SAP.; SUDIHARJO, SAP., M.Pd.	
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SD (Non Kumulatif)	98.20 Prosen	97.72	97.72	99.51		
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SMP (Non Kumulatif)	99.40 Prosen	98.09	98.09	98.68		
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang TK/PAUD (Non Kumulatif)	73.40 Prosen	37.49	37.49	51.08		
		Penerapan Manajamen Berbasis Sekolah (Non Kumulatif)	100 Prosen	69.46	69.46	69.46		

REALIASI ANGGARAN (*Input*) , CAPAIAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (*Sub Output*) DINAS PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kode	Nama Sub Kegiatan Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Rasio (%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(7)	(9)
1	0.00.01.2. 01.01.	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	352.711.200,00	350.441.200,00	2.270.000,00	99.36	Terdapat siswa anggaran yang tidak terserap karena adanya Sisa penawaran
		Dokumen Renstra 2019 - 2024 dan Dokumen Renja Tahunan (Kumulatif)	3 Dokumen yang valid	3		100	
2	0.00.01.2. 01.02.	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	8.885.800,00	8.799.300,00	86.500,00	99.03	
		Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) (Kumulatif)	4 Dokumen yang valid	4		100	
3	0.00.01.2. 01.07.	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	67.732.000,00	65.932.000,00	1.800.000,00	97.34	Terdapat siswa anggaran yang tidak terserap karena adanya penyesuaian belanja.
		Dokumen Evaluasi Kinerja (SKM, SPM dan Monev) (Kumulatif)	3 Dokumen yang valid	3		100	
		Dokumen Evaluasi Kinerja (SPM, IKM) (Kumulatif)	2 Dokumen yang valid	1		50	
4	0.00.01.2. 02.01.	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	979.263.708.851,00	936.680.111.887,00	42.583.596.964,00	95.65	Sisa pembayaran gaji dan tunjangan PNS
		Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan (Non Kumulatif)	1454 Orang Pegawai	9296		639.34	
5	0.00.01.2. 02.04.	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	431.906.300,00	431.498.188,00	408.112,00	99.91	Terdapat siswa anggaran yang tidak terserap karena adanya Kelebihan penghitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan
		Dokumen Bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset barang milik daerah (Kumulatif)	1 Dokumen yang valid	1		100	
6	0.00.01.2. 02.07.	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	69.829.900,00	69.829.900,00	-	100	

		Dokumen Laporan Daya serap keuangan (Kumulatif)	3 Dokumen yang valid	2		66.67	
7	0.00.01.2. 03.02.	**Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	160.482.000,00	142.982.000,00	17.500.000,00	89.10	Terdapat siswa anggaran yang tidak terserap karena adanya biaya sewa tanah yang tidak dibayarkan untuk SKB dan SLB dengan alasan : - Sewa Tanah untuk SKB tidak dibayarkan sewa tanahnya sehubungan telah pindah kantor dan SLB tidak dibayar - dan sewa tanah untuk SLB tidak dibayar karena bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten tetapi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
		Penataan Lahan Tanah Bangunan Gedung Sekolah TK, SD dan SMP dan UPT SKB yang disewa dari masyarakat / pemerintahan desa (Non Kumulatif)	15 Lokal	15		100	
8	0.00.01.2. 06.01.	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	78.157.600,00	78.157.600,00	-	100	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik (Kumulatif)	126 Unit	126.10		100.08	
9	0.00.01.2. 06.05.	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	467.289.200,00	395.885.100,00	71.404.100,00	84.72	Terdapat siswa anggaran yang tidak terserap karena adanya Sisa penawaran
		Barang cetakan dan penggandaan (Kumulatif)	1045 Paket	1045		100	
10	0.00.01.2. 06.06.	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	190.020.000,00	190.020.000,00	-	100	
		Behan bacaan Media masa (Kumulatif)	12800 Eksemplar	12865		100.51	
11	0.00.01.2. 06.07.	**Penyediaan Bahan/Material**	497.455.800,00	497.439.000,00	16.800,00	100	
		Alat Tulis Kantor (Kumulatif)	1100 Paket	935		85	

12	0.00.01.2. 06.08.	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	246.290.000,00	246.290.000,00	-	100	
		Makanan dan Minuman untuk rapat-rapat kedinasan (Non Kumulatif)	42 Unit Kerja	42		100	
13	0.00.01.2. 06.09.	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	62.713.000,00	62.713.000,00	-	100	
		Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kumulatif)	12 Bulan	12		100	
14	0.00.01.2. 07.02.	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	453.200.000,00	371.100.000,00	82.100.000,00	81.88	Terdapat siswa anggaran yang tidak terserap karena adanya Sisa penawaran
		Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 (Kumulatif)	25 Unit	25		100	
15	0.00.01.2. 07.10.	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	173.380.000,00	172.683.250,00	696.750,00	99.60	Terdapat siswa anggaran yang tidak terserap karena adanya Sisa penawaran
		Perlengkapan Gedung Kantor (Kumulatif)	10 Paket Unit	15.05		150.50	
16	0.00.01.2. 08.02.	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	459.391.560,00	386.100.910,00	73.290.650,00	84.05	Terdapat siswa anggaran yang tidak terserap karena adanya Sisa pemakaian listrik, telepon, air dan internet
		Penyediaan Jasa telepon, listrik dan air untuk Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Koorwil Bidang Pendidikan Kecamatan dan Kantor Sanggar Kegiatan Belajar (Non Kumulatif)	42 Unit	42		100	
17	0.00.01.2. 08.04.	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	59.511.800,00	59.511.800,00	-	100	
		Dokumen Teknis Pengadministrasian dan Tata Kelola Kearsipan (Kumulatif)	1 Dokumen	1		100	
18	0.00.01.2. 09.01.	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	388.683.000,00	388.683.000,00	-	100	
		Bahan Bakar Kendaraan Dinas (Kumulatif)	278 Unit	278.15		100.05	
19	0.00.01.2. 09.02.	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	56.720.000,00	56.720.000,00	-	100	
		STNK Kendaraan Dinas (Kumulatif)	278 Unit	278		100	

20	0.00.01.2. 09.06.	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	216.700.000,00	216.700.000,00	-	100	
		Peratalatan Gedung Kantor (Non Kumulatif)	42 Unit Kerja	42		100	
21	0.00.01.2. 09.09.	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	1.611.059.700,00	1.607.990.618,00	3.069.082,00	99.81	Terdapat siswa anggaran yang tidak terserap karena adanya Sisa penawaran dan Sisa BPJS Ketenagakerjaan
		Gedung Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Koorwil Bid. Pendidikan Kecamatan dan Kantor SKB (Non Kumulatif)	42 Unit	42		100	
22	1.01.02.2. 01.02.	**Penambahan Ruang Kelas Baru**	5.598.521.100,00	5.419.762.878,00	178.758.222,00	96.81	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 178.758.222, ini merupakan Sisa dari penawaran/negosiasi harga pengadaan
		Jumlah Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar (Kumulatif)	100 Lokal	21		21	
23	1.01.02.2. 01.05.	**Pembangunan Perpustakaan Sekolah**	1.235.170.300,00	1.234.915.300,00	255.000,00	99.98	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 255.000, ini merupakan Sisa dari penawaran/negosiasi harga pengadaan
		Ruang Pepustakaan Sekolah (Kumulatif)	53 Lokal	6		11.32	
24	1.01.02.2. 01.06.	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	9.530.519.300,00	9.489.567.565,00	40.951.735,00	99.57	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 40.951.735,- ini merupakan Sisa dari penawaran/negosiasi harga pengadaan
		Halaman dan lingkungan gedung sekolah terpagar dan tertata rapih (Kumulatif)	76 Lokasi	40		52.63	
		Sarana Air bersih dan Jamban Sekolah (Kumulatif)	68 Sekolah	64		94.12	
25	1.01.02.2. 01.08.	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas**	26.372.257.800,00	26.238.670.634,00	133.587.166,00	99.49	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 133.587.166,- ini merupakan Sisa dari penawaran/negosiasi harga pengadaan
		Ruang Kelas Sekolah SD (Kumulatif)	450 Lokal	444		98.67	
26	1.01.02.2. 01.11.	**Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah**	1.340.704.100,00	1.339.409.100,00	1.295.000,00	99.90	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 11.295.000,- ini merupakan Sisa dari penawaran/negosiasi harga pengadaan

		Ruang Sarana Membaca Bagi Siswa (Kumulatif)	50 Lokal	9		18	
27	1.01.02.2. 01.14.	**Pengadaan Mebel Sekolah**	481.008.700,00	474.374.300,00	6.634.400,00	98.62	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 6.634.400,- ini merupakan Sisa dari penawaran/negosiasi harga pengadaan
		Meubelair Sekolah SD (Kumulatif)	175 Lokal	10		5.71	
28	1.01.02.2. 01.16.	**Pengadaan Perlengkapan Sekolah**	15.987.945.900,00	15.419.201.900,00	568.744.000,00	96.44	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 568.744.000,- ini merupakan Sisa dari penawaran/negosiasi harga pengadaan
		Pengadaan Sarana Prasarana TIK (Kumulatif)	176 Paket	636		361.36	
29	1.01.02.2. 01.17.	**Pengadaan Perlengkapan Siswa**	700.112.200,00	518.692.625,00	181.419.575,00	74.09	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 181.419.575,- ini merupakan Sisa dari penawaran/negosiasi harga pengadaan
		Buku referensi, Buku dan Alat Tulis Siswa dan Raport Siswa (Kumulatif)	1 Paket	1		100	
30	1.01.02.2. 01.24.	**Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar**	64.274.000,00	64.229.610,00	44.390,00	99.93	
		Dokumen Hasil Monev UN/US Sekolah Dasar (Kumulatif)	928 Sekolah	464		50	
		Peserta Sosialisasi penyelenggaran pendidikan sekolah dasar (Kumulatif)	561 orang	0		0	
31	1.01.02.2. 01.25.	**Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**	364587900	364587900	-	100	
		Lomba OSN, O2SN , FLSN, Calistung dan Pasanggiri (Non Kumulatif)	55 Cabang Lomba	25		45.45	
32	1.01.02.2. 01.27.	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar**	1.992.918.000,00	1.011.384.244,00	981.533.756,00	50.75	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 198.533.756,- tidak terserap hal ini karena adanya 1 (satu) Guru meninggal dunia.
		Guru SD di Daerah Terpencil penerima tunjangan (Kumulatif)	48 orang	40		83.33	
		Jumlah Guru Penggerak pada jenjang Sekolah Dasar (SD) (Kumulatif)	40 orang	0		0	
		Juara I, II, dan III Guru SD Berprestasi. (Kumulatif)	9 Orang	0		0	

33	1.01.02.2. 01.29.	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar**	182.573.020.000,00	178.329.700.314	4.243.319.686,00	142.11	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 4.243.319.686,- yang merupakan Anggaran BOSDA dari APBD tidak terserap hal ini karena adanya guru yang Lulus PPPK dan yang meninggal dunia
		Sekolah Dasar (SD) mendapat dana BOS (Non Kumulatif)	925 Unit	875		94.59	
		Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Pada Sedkolah Dasar (Non Kumulatif)	925 Sekolah				
		PTK Non PNS pada Sekolah Dasar Negeri mendapatkan Honorarium (Non Kumulatif)	4500 orang	4010		89.11	
34	1.01.02.2. 01.30.	**Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar**	240.558.400,00	224.012.572,00	16.545.828,00	93.12	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 16.545.828,- tidak terserap , merupakan anggaran untuk honor jasa Narasumber.
		Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan dan Pengadminstrasian Dana BOS (Non Kumulatif)	925 Orang	480		51.89	
35	1.01.02.2. 02.02.	**Penambahan Ruang Kelas Baru**	1.438.248.400,00	1.421.282.611,00	16.965.789,00	98.82	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 16.965.789,- tidak terserap , merupakan sisa hasil penawaran/ negosiasi harga.
		Ruang Kelas Baru SMP (Kumulatif)	6 Lokal	6		100	
36	1.01.02.2. 02.10.	**Pembangunan Fasilitas Parkir**	996.324.600,00	991.234.943,00	5.089.657,00	99.49	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 5.089.657,- tidak terserap , merupakan sisa hasil penawaran/ negosiasi harga.
		Pagar dan halaman lingkungan gedung sekolah (Kumulatif)	6 Lokal	6		100	
37	1.01.02.2. 02.12.	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	1.827.163.200,00	1.824.234.017,00	2.929.183,00	99.84	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.929.183,- tidak terserap , merupakan sisa hasil penawaran/ negosiasi harga.
		Jamban Siswa dan Sarana Air bersih (Kumulatif)	72 unit	72		100	

38	1.01.02.2. 02.14.	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**	10.915.391.600,00	10.899.948.492,00	15.443.108,00	99.86	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 15.443.108,- tidak terserap , merupakan sisa hasil penawaran/ negosiasi harga.
		Ruang Kelas Sekolah SMP (Kumulatif)	81 Lokal	81		100	
39	1.01.02.2. 02.15.	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah**	946.756.000,00	946.756.000,00	-	100	
		Ruang Kerja Guru (Kumulatif)	4 Ruang	4		100	
40	1.01.02.2. 02.17.	**Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah**	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-	100	
		Ruang Perpustakaan Sekolah (Kumulatif)	4 Unit	4		100	
41	1.01.02.2. 02.18.	**Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium**	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-	100	
		Ruang Laboratorium Sekolah (Kumulatif)	4 lokal	4		100	
42	1.01.02.2. 02.19.	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula**	200.000.000,00	199.551.600,00	448.400,00	99.78	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 448.400,- tidak terserap , merupakan sisa hasil penawaran/ negosiasi harga.
		Sarana Olah Raga Sekolah (Kumulatif)	3 Paket	1		33.33	
43	1.01.02.2. 02.24.	**Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	607.900.000,00	607.900.000,00	-	100	
		Ruang WC Siswa dan Guru (Kumulatif)	6 Unit	6		100	
44	1.01.02.2. 02.25.	**Pengadaan Mebel Sekolah**	101.954.200,00	101.234.200,00	720.000,00	99.29	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 720.000,- tidak terserap , merupakan sisa hasil penawaran/ negosiasi harga.
		Meubaliar Sekolah SMP (Kumulatif)	4 Lokal	4		100	
45	1.01.02.2. 02.27.	**Pengadaan Perlengkapan Sekolah**	1.125.000.000,00	1.055.052.000,00	69.948.000,00	93.78	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 69.948.000,- tidak terserap , merupakan sisa hasil penawaran/ negosiasi harga.
		Perlengkapan sarana dan prasarana kebersihan sekolah (Kumulatif)	160 Unit	162		101.25	
46	1.01.02.2. 02.28.	**Pengadaan Perlengkapan Siswa**	894.661.000,00	810.244.330,00	84.416.670,00	90.56	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 84.416.6700,- tidak terserap , merupakan sisa hasil penawaran/ negosiasi harga.

		Buku Referensi, Pengayaan Panduan Pendidikan dan Raport Siswa (Kumulatif)	1 Paket	1		100	
47	1.01.02.2. 02.32.	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama**	169.588.000,00	169.096.720,00	491.280,00	99.71	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 491.096.720,- tidak terserap , merupakan sisa hasil penawaran/ negosiasi harga.
		Jumlah siswa tidak mempu Penerima Beasiswa (Kumulatif)	250 orang	251		100.40	
48	1.01.02.2. 02.36.	**Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik**	415.022.700,00	341.744.922,00	73.277.778,00	82.34	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 73.277.778,- tidak terserap hal ini merupakan Sisa Pengadaan Barang/Jasa dan Pencairannya sesuai kebutuhan
		Dokumen Hasil Pelaksanaan PPDB On Line (Kumulatif)	1 dokumen	1		100	
49	1.01.02.2. 02.40.	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	1.390.828.000,00	235.714.185,00	1.155.113.815,00	16.95	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.155.113.815,- tidak terserap, hal ini terjadi karena jumlah GBDT untuk jenjang SMP hanya 32 orang sehingga Pencairanya sesuai dengan kebutuhan
		Guru Berprestasi (Kumulatif)	209 orang	211		100.96	
		Jumlah Peserta Pelatihan dan Workshof (Kumulatif)	160 orang				
		Peseta mendapatkan sertifikat (Kumulatif)	300 orang				
		Jumlah Guru Penggerak pada jenjang SMP (Kumulatif)	250 Guru				

50	1.01.02.2. 02.42.	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama**	69.138.775.000,00	67.416.396.665,00	1.722.378.335,00	140.90	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.722.378.335,- yang merupakan Anggaran BOSDA dari APBD tidak terserap hal ini karena adanya guru yang Lulus PPPK dan yang meninggal dunia
		Sekolah SMP Penerima dana BOS (Non Kumulatif)	210 Sekolah	210		100	

		Sekolah SMP Penerima Dana Operasional Sekolah (Non Kumulatif)	210 Sekolah	210		100	
51	1.01.02.2. 02.43.	**Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama**	298.712.800,00	284.807.600,00	13.905.200,00	95.34	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 13.905.200,- yang merupakan Anggaran tidak terserap hal ini karena adanya penyesuaian kebutuhan belanja
		Peserta Bimtek Pengelolaan dan Pengadiministrasian Dana BOS bagi Bendahara dan Manajer Sekolah. (Non Kumulatif)	210 Orang	210		100	
52	1.01.02.2. 03.02.	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD**	928.331.000,00	928.331.000,00	-	100	
		Tersedianya sarana prasarana bermain (Kumulatif)	4 Unit	4		100	
		Pemasangan Instalasi Listrik dari PLN (Kumulatif)	0 Paket	0		0	
		Sarana Ruang Pembelajaran Lainnya (RPL) (Kumulatif)	6 Unit	6		100	
53	1.01.02.2. 03.10.	**Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD**	442.092.000,00	426.121.000,00	15.971.000,00	96.39	Terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp **15.971.000**,- hal ini merupakan sisa dari :

							Honor Pejabat Pengadaan tidak diserap **Rp. 850.000,-** karena dari anggaran 4 kegiatan hanya dijadikan 2 kegiatan pengadaan jadi tidak terserap untuk 2 kegiatan yaitu honor **Rp. 550.000,-** (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rp50 juta sampai dengan Rp200 juta) dan **Rp. 300.000,-** (Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp50 juta)
							Sisa Hasil Penawaran **Rp. 12.625.000,-** (Belanja Cetak STSB dan Sampul STSB pagu anggaran Rp.184.500.000,- terserap Rp. 183.375.000 sisa **RP. 1.125.000,-** dan Belanja Cetak Raport dan sampul raport pagu anggaran RP. 210.000.000,- terserap Rp. 198.500.000,- sisa **Rp. 11.500.000,-**)
							Belanja Iuran Jaminan Kesehatan (**Rp. 2.184.000,**), JKK (**Rp. 144.000**) dan JKM (**Rp. 168.000,-**) 2 orang TKK selama 12 bulan tidak diserap karena belum terdaftar di BPJS
		Buku Referensi dan Raport (Kumulatif)	20500 Paket / Exemplar	20500		100	
54	1.01.02.2. 03.13.	**Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD**	53.003.900,00	53.003.900,00	-	100	

		Lembaga Penyelenggara PAUD (Kumulatif)	24 Lembaga	24		100	
55	1.01.02.2.03.14.	**Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD**	103.110.400,00	103.110.400,00	-	100	
		Dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan PAUD (Kumulatif)	1 Dokumen	1		100	
56	1.01.02.2.03.16.	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD**	225.629.500,00	225.629.500,00	-	100	
		Jumlah Guru TK, Pengawas TK, dan Kepala TK Berprestasi, dan Peserta Lokakarya (Kumulatif)	18 Orang	18		100	
		Jumlah Guru Penggerak pada Jenjang TK (Kumulatif)	150 orang	150		100	
57	1.01.02.2.03.17.	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD**	477.005.000,00	476.731.830,00	273.170,00	99.94	Terdapat sisa anggaran yang tidak terserap hal ini sebesar Rp **273.170**,- hal ini terjadi karana adanya :
							Sisa belanja Kertas dan Cover **Rp. 138.500,-**
							Sisa Iuran JKK (**RP. 68.682,-**) dan JKM (**Rp. 65.988,-**) untuk 3 orang TKK selama 12 bulan (diserap sesuai tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan)
		Jumlah Peserta sosialisasi Program Bantuan Operasional Pendidikan PAUD terhadap Kepala Sekolah TK/PAUD (Kumulatif)	100 Orang	105		105	

		Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Persiapan sekolah yang akan diakreditasi (Kumulatif)	100 Dokumen	150		150	
58	1.01.02.2. 03.18.	**Pengelolaan Dana BOP PAUD**	22.694.430.000,00	22.649.430.000,00	45.000.000,00	92.48	Terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 45.000.000,- ini merupakan Belanja Jasa Tenaga Pendidikan tidak diserap karena disesuaikan dengan jumlah PTK yang ada di TK Negeri (insentif masa kerja 11 th s.d. 15 th tidak terserap 22 org x 12 bln x Rp. 200.000,- = **Rp. 24.000.000,-** dan insentif masa kerja lebih dari 16 th tidak terserap 7 org x 12 bln x Rp. 250.000,- = **Rp. 21.000.000,-** jadi total Rp. 45.000.000,-)
		Jumlah lembaga TK/PAUD Penerima dana BOP (Non Kumulatif)	789 Lembaga	781		98.99	
		PTK Non PNS pada TK Negeri Penerima Honorarium dari APBD Kabupaten (Non Kumulatif)	42 Orang	42		100	
59	1.01.02.2. 03.19.	**Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD**	166.916.000,00	159.116.000,00	7.800.000,00	95.33	Terdapat sisa anggaran yang tidak direalisasikan untuk Belanja Mamin Rapat sebesar Rp.7.800.000,-karena untuk kegiatan sosialisasi BOP PAUD di anggaran rubahan dialihkan ke kegiatan lain sehingga tidak ada belanja untuk mamin rapat
		Peserta Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan BOP (Non Kumulatif)	800 orang	400		50	

		Dokumen Adminstrasi Pengelolaan dana BOP PAUD (Kumulatif)	0 Dok	789		0	
60	1.01.02.2. 04.12.	**Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan**	3.654.363.100,00	3.635.829.035,00	18.534.065,00	99.49	Terdapat sisa anggaran yang tidak direalisasikan sebesar Rp 18.534.065,- hal ini terjadi karena :
							1. Adanya Sisa Penawaran / Negosiasi harga
							2. Adanya Pegawai TKK atas nama Riska Pratama mengundurkan diri (Bulan Agustus sd Desember tidak diserap)
							3. Adanya Sisa Pembayaran Iusaran BPJS Kesehatan, JKK dan JKM
		Lulusan kesetaraan Paket C setara SMA (Kumulatif)	3500 orang	2170		62	
		Lulusan Warga Belajar Kesetaraan Paket B Setara SMP (Non Kumulatif)	1300 Orang	1208		92.92	
		Warga Belajar Paket A setara SD (Kumulatif)	254 Warga Belajar	240		94.49	
61	1.01.02.2. 04.15.	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	229.322.700,00	226.588.100,00	2.734.600,00	98.81	Terdapat sisa anggaran yang tidak direalisasikan sebesar Rp 2.734.600,- hal ini karena adanya belanja Honor Panitia Kegiatan Bagi TKK tidak direalisasikan
		Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga pendidikan (Tutor) untuk kesetaraan Paket C	90 orang	90		100	

		(Kumulatif)					
		Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (Kumulatif)	90 orang	90		100	
		terlaksananya pelatihan kompetensi tutor paket b (Kumulatif)	90 orang	190		211.11	
62	1.01.02.2. 04.16.	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan**	74.552.600,00	74.252.600,00	300.000,00	99.60	Terdapat sisa anggaran yang tidak direalisasikan sebesar Rp 300.000,- hal ini karena adanya belanja Honor Panitia Kegiatan Bagi TKK tidak direalisasikan
		Sosialiasasi terhadap Pengelola PKBM dan LKP yang belum terakreditasi, Sosialisasi juknis DAK Non Fisik BOP Kesetaraan, dan Sosialisasi Pelaksanaan UNBK (Non Kumulatif)	80 Lembaga	80		100	
		Dokumen Laporan Kegiatan (Kumulatif)	1 dokumen	1		100	
		Terselenggaranya Ekspo Pendidikan Masyarakat (Non Kumulatif)	0 Kegiatan	0		0	
		Jumlah Tutor LKP Berprestasi (Kumulatif)	7 Kategori	7		100	
		Jumlah Peserta Bimtek Life Skill (Kumulatif)	0 Orang	350		0	
		Jumlah TBM (Taman Bacaan Masyarakat) di Kab. Cirebon	0 Unit	80		0	

		(Kumulatif)					
63	1.01.02.2. 04.17.	**Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan**	9.453.900.000,00	9.453.900.000,00	-	100	Pendapatan BOP Kesetaraan berdasarkan SP3B Rp. 9.902.450.000, Pencatatan pada SP2B Rp. 9.756.200.000 terdapat sehingga terdapat selisih Rp. 146.250.000 karena ada pengembalian ke kas negara melalui BUD (PKBM Darul Kawakib Ditutup)
		Dana Bantuan Operasional Pendidikan untuk Lembaga PKBM (Non Kumulatif)	63 Lembaga	63		100	
64	1.01.03.2. 01.04.	**Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	120.011.200,00	120.011.200,00	-	100	
		Guru peserta pelatihan mendapat sertifikat (Kumulatif)	250 orang	45		18	
65	1.01.03.2. 02.02.	**Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	112.044.400,00	112.044.400,00	-	100	
		Sertifikat Peserta Bimtek Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD (Non Kumulatif)	195 Eksemplar	195		100	

66	1.01.04.2. 01.01.	**Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	290.109.000,00	271.538.446,00	18.570.554,00	93.60	Terdapat sisa anggaran yang tidak direalisasikan sebesar Rp 18.570.554,- hal ini karena adanya satu pekerjaan pertemuan Pendampingan Pelatihan Teknis Pengelolaan Aplikasi DAPODIKDASMENPAUD yang tidak tidak dilaksanakan karena dari BBPMP melaksanakan juga pendampingan ke daerah.
		Peserta Bimtek Aplikasi Dapodikdasmen (Kumulatif)	0 orang	0		0	
		Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Verval PTK dan Verval PD (Kumulatif)	0 orang	0		0	
		Dokumen Profil Pendidikan (Kumulatif)	0 Dokumen yang valid	1		0	
		Aplikasi Sistem Pengelolaan Data Profil Pendidikan (Non Kumulatif)	1 Aplikasi				
		Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kumulatif)	1 Dokumen yang valid	1		100	
67	1.01.04.2. 01.02.	**Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	126.575.700,00	126.412.996,00	162.704,00	99.87	
		Jumlah Peseta Bimbingan Teknis memahami dan menguasi materi pelatihan yang telah diberikan dan bisa mengimplementasikan pada tugas yang diampunya (Kumulatif)	500 Orang	500		100	

Dari Table Diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan perhitungan efesiensi dan efektifitas kegiatan didapat bahwa tingkat efesiensi dan efektifitas dari 67 sub kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2022 yaitu:

a. Efektif dan Efisien. Yaitu realisasi input < 100% namun realisai output dan outcome mencapai 100%.

   Sebanyak 28 Sub Kegiatan masuk dalam katagori efektif dan efisien (80,00 %). Kegiatan tersebut tersebar pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 kegiatan, 3 Sub Kegiatan. 1 kegiatan, 2 Sub Kegiatan. 1 kegiatan, 3 Sub Kegiatan. 1 kegiatan, 1 sub kegiatan. 1 kegiatan, 1 sub kegiatan. 1 kegiatan, 1 sub kegiatan. Program Pengelolaan Pendidikan 1 kegiatan, 6 sub kegiatan. 1 kegiatan, 3 sub kegiatan. 1 kegiatan, 7 sub kegiatan. 1 kegiatan, 1 sub kegiatan.

b. Efisien. Yaitu realisasi input, output dan outcome mencapai 100%.

   Sebanyak 10 sub kegiatan masuk dalam katagori efisien (20 %). Sub kegiatan tersebut meliputi 1 kegiatan 1 sub kegiatan. 1 kegiatan 1 sub kegiatan. 1 kegiatan 2 sub kegiatan. 1 kegiatan 1 sub kegiatan. 1 kegiatan 3 sub kegiatan. Program pengelolaan pendidikan 1 kegiatan 1 sub kegiatan. 1 kegiatan 1 sub kegiatan.

c. In Efisien. Yaitu realisasi input lebih besar daripada realisasi output dan outcome.

   Sebanyak 29 kegiatan termasuk katagori in efisien (30 %) yaitu tersebar di beberapa program kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2022 telah ditetapkan 5 (Lima) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan. Rata-rata capaian Kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan pada Rencana Kinerja tahun 2022 menunjukkan angka keberhasilan sebagai berikut : 90% Mencapai target/meningkat dan 10% tidak mencapai target.

Pada dasarnya tugas-tugas yang diemban oleh Dinas pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 sesuai yang ditetapkan dalam rencana strategis telah dapat memenuhi fungsi sebagai Lembaga yang memiliki fungsi pengelolaan pendidikan.

Fungsi utama yang harus dilaksanakan lembaga ini adalah sebagai penyelenggaraan kegiatan operasional dibidang pendidikan telah berjalan dengan semestinya dan tidak mendapat hambatan yang berarti (berjalan lancar). Indikator dari kondisi tersebut dapat dilihat bahwa realisasi keuangan mencapai 95,65% dan realisasi fisik mencapai 97,46%. Dengan adanya kegiatan tersebut terdapat peningkatan mutu pendidikan, sarana dan prasarana sehingga memperlancar proses belajar mengajar diseluruh jenjang pendidikan baik formal maupun non formal.

Disadari atau tidak, kekurangan pasti ada. Namun hal tersebut dapat dijadikan bahan introspeksi diri guna perbaikan terhadap sesuatu yang dirasa masih kurang dan mempertahankan serta meningkatkan kinerja yang sudah baik yang telah dicapai oleh Dinas pendidikan Kabupaten Cirebon.

---------- *** ----------

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022

INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN

No.	Sasaran/Outcome /Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
1	**SASARAN**				
	1. Meningkatnya kemampuan membaca	1. Capaian Angka Melek Huruf Latin		97.16	99.78
		2. Capaian Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa		76.91	82.29
	2. Meningkatnya Akses pendidikan yang meluas dan merata	Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		7.18	**7.40**
	3. Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)		12.82	**12.28**
	4. Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan	1, Manajeman Bebasisa Sekolah		100	100
		2. Capaian Indek Kepuasan Masyarakat (Point)		78.42	**82.43**
	5. Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan	1. Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Dokumen	6	6
		a. Dokumen Perencanaan			4
		b. Laporan Kinerja dan Keuangan			1
		c. Dokumen Data dan Informasi yang Valid			1
		2. Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100
		(Persentasi Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran)			
		3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparantur	Persen	100	100
		(Persentasi Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik)			
	OUTCOME				
	Program Pengelolaan Pendidikan	Peningkatan Persentase Masyarkat Melek Aksara	Persentasi	96.58	96.58
		Angka partisipasi kasar PAUD/TK	Persentasi	100	52.71
		Angka partisipasi kasar SD	Persentasi	100	100.42
		Angka partisipasi kasar SMP	Persentasi	100	110.89
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persentasi	100	90.68
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persentasi	100	94.30
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik jenjang SD	Persentasi	98.2	88.44
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik PAUD/TK	Persentasi	61.09	55.24
		Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	Persentasi	90	69.86
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik jenjang SMP	Persentasi	99.40	70.73
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah PAUD/TK	Persentasi	60	55.24
		Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	Persentasi	70.08	77.09
		Capaian Indek SPM Pendidikan Dasar yang terdiri dari unsur :	**Point**	**100**	**91.40**
		1. Ketersedian Ruang Kelas dengan Rasio : Jml rombel <= 32 siswa			
		2. Ketersediaan Guru Berizah S1 / D.IV			
		3. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)			
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang TK/PAUD	Persentasi	73.4	79.59
		Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	Persentasi	81	78.27
		Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan	Lembaga	75	75
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts	Persentasi	100	106.52
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentasi	100	100
		Meningkatnya Angka Lulusan SMP/MTs	Persentasi	99.99	99.23
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SD	Persentasi	71.27	62.46
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SMP	Persentasi	81.5	76.36

		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD	Persentasi	70	33.02
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SMP	Persentasi	70	64.73
	Program Pengembangan Kurikulum	Angka partisipasi kasar TK/PAUD	Persentasi	100	52.71
		Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	Persentasi	90	69.86
		Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	Persentasi	70.08	77.09
		Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	Persentasi	81	78.27
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentasi	100	100
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SD	Persentasi	98.2	88.44
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SMP	Persentasi	99.4	70.73
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang TK/PAUD	Persentasi	73.4	79.59
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efeltipitas dalam penyusunan laporan perencanaan	Point	78.40	82.43
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Point	78.40	82.43
		Peningkatan Mutu SDM dalam pelayanan terhadap masyarakat	Point	78.40	82.43
		Peningkatan Kedisplinan dan Mutu Pelayanan Aparatur terhadap masyarakat	Point	78.40	82.43
		Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran	Point	78.40	82.43
	Kinerja Utama				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penduduk Usia sekolah SD dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	Siswa	190,798	**198,798**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penduduk Usia sekolah SMP dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	Siswa	83,360	**81,011**
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Penduduk Drop out sekolah dapat melanjutkan pendidikan dan memiliki Ijazah kesetaraan	Warga Belajar	10,941	**12,057**
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penduduk Usia Pra Sekolah (Usia Dini) dapat mengikuti pengenalan pendidikan melalui pendidikan Pra Sekolah (TK / PAUD)	Peserta Didik	32,888	**56,095**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

H. RONIANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

REALISASI TAHUN INI DENGAN REALISASI SAMPAI DENGAN REALISASI TAHUN LALU

INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN

No.	Sasaran/Outcome /Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
1	**SASARAN**				
	1. Meningkatnya kemampuan membaca	1. Capaian Angka Melek Huruf Latin		99.73	99.78
		2. Capaian Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa		69.88	82.29
	2. Meningkatnya Akses pendidikan yang meluas dan merata	Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		7.10	**7.40**
	3. Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)		12.27	**12.28**
	4. Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan	1, Manajeman Bebasisa Sekolah		100	100
		2. Capaian Indek Kepuasan Masyarakat (Point)		80.51	**82.43**
	5. Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan	1. Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Dokumen	–	6
		a. Dokumen Perencanaan		–	4
		b. Laporan Kinerja dan Keuangan		–	1
		c. Dokumen Data dan Informasi yang Valid		–	1
		2. Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persentasi Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran)	Persen	–	100
		3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparantur (Persentasi Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik)	Persen	–	100
	OUTCOME				
	Program Pengelolaan Pendidikan	Peningkatan Persentase Masyarkat Melek Aksara	Persentasi	–	96.58
		Angka partisipasi kasar PAUD/TK	Persentasi	58.49	52.71
		Angka partisipasi kasar SD	Persentasi	99.56	100.42
		Angka partisipasi kasar SMP	Persentasi	110.14	110.89
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persentasi	90.53	90.68
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persentasi	87.63	94.30
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik jenjang SD	Persentasi	97.60	88.44
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik PAUD/TK	Persentasi	93.20	55.24
		Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	Persentasi	88.50	69.86
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik jenjang SMP	Persentasi	98.50	70.73
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah PAUD/TK	Persentasi	–	55.24
		Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	Persentasi	88.00	77.09
		Capaian Indek SPM Pendidikan Dasar yang terdiri dari unsur : 1. Ketersedian Ruang Kelas dengan Rasio : Jml rombel <= 32 siswa 2. Ketersediaan Guru Berizah S1 / D.IV 3. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	**Point**	72.33	91.40
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang TK/PAUD	Persentasi	76.84	79.59
		Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	Persentasi	88.89	78.27
		Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan	Lembaga	–	75
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts	Persentasi	113.32	106.52
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentasi	99.30	100
		Meningkatnya Angka Lulusan SMP/MTs	Persentasi	97.58	99.23
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SD	Persentasi	64.58	62.46
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SMP	Persentasi	70.79	76.36
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD	Persentasi	–	33.02
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SMP	Persentasi	–	64.73
	Program Pengembangan Kurikulum	Angka partisipasi kasar TK/PAUD	Persentasi	58.49	52.71
		Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	Persentasi	88.50	69.86

INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN

No.	Sasaran/Outcome /Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	Persentasi	88.00	77.09
		Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	Persentasi	88.89	78.27
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentasi	99.30	100
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SD	Persentasi	97.60	88.44
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SMP	Persentasi	98.50	70.73
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang TK/PAUD	Persentasi	76.84	79.59
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efeltipitas dalam penyusunan laporan perencanaan	Point	–	82.43
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Point	–	82.43
		Peningkatan Mutu SDM dalam pelayanan terhadap masyarakat	Point	–	82.43
		Peningkatan Kedisplinan dan Mutu Pelayanan Aparatur terhadap masyarakat	Point	–	82.43
		Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran	Point	–	82.43
	Kinerja Utama				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penduduk Usia sekolah SD dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	Siswa	–	198,798
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penduduk Usia sekolah SMP dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	Siswa	–	81,011
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Penduduk Drop out sekolah dapat melanjutkan pendidikan dan memiliki Ijazah kesetaraan	Warga Belajar	–	12,057
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penduduk Usia Pra Sekolah (Usia Dini) dapat mengikuti pengenalan pendidikan melalui pendidikan Pra Sekolah (TK / PAUD)	Peserta Didik	–	56,095

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

H. RONIANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

REALISASI TAHUN INI DENGAN REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI

INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN

No.	Sasaran/Outcome /Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2022
1	**SASARAN**				
	1. Meningkatnya kemampuan membaca	1. Capaian Angka Melek Huruf Latin		99.78	99.78
		2. Capaian Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa		82.29	82.29
	2. Meningkatnya Akses pendidikan yang meluas dan merata	Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		**7.40**	**7.40**
	3. Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)		**12.28**	**12.28**
	4. Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan	1, Manajeman Bebasisa Sekolah		100	100
		2. Capaian Indek Kepuasan Masyarakat (Point)		**82.43**	**82.43**
	5. Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan	1. Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Dokumen	6	6
		a. Dokumen Perencanaan		4	4
		b. Laporan Kinerja dan Keuangan		1	1
		c. Dokumen Data dan Informasi yang Valid		1	1
		2. Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persentasi Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran)	Persen	100	100
		3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparantur (Persentasi Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik)	Persen	100	100
	OUTCOME				
	Program Pengelolaan Pendidikan	Peningkatan Persentase Masyarkat Melek Aksara	Persentasi	96.58	96.58
		Angka partisipasi kasar PAUD/TK	Persentasi	52.71	52.71
		Angka partisipasi kasar SD	Persentasi	100.42	100.42
		Angka partisipasi kasar SMP	Persentasi	110.89	110.89
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persentasi	90.68	90.68
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persentasi	94.30	94.30
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik jenjang SD	Persentasi	88.44	88.44
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik PAUD/TK	Persentasi	55.24	55.24
		Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	Persentasi	69.86	69.86
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik jenjang SMP	Persentasi	70.73	70.73
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah PAUD/TK	Persentasi	55.24	55.24
		Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	Persentasi	77.09	77.09
		Capaian Indek SPM Pendidikan Dasar yang terdiri dari unsur : 1. Ketersedian Ruang Kelas dengan Rasio : Jml rombel <= 32 siswa 2. Ketersediaan Guru Berizah S1 / D.IV 3. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	**Point**	91.40	91.40
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang TK/PAUD	Persentasi	79.59	79.59
		Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	Persentasi	78.27	78.27
		Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan	Lembaga	75	75
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts	Persentasi	106.52	106.52
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentasi	100	100
		Meningkatnya Angka Lulusan SMP/MTs	Persentasi	99.23	99.23
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SD	Persentasi	62.46	62.46
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SMP	Persentasi	76.36	76.36
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD	Persentasi	33.02	33.02
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SMP	Persentasi	64.73	64.73
	Program Pengembangan Kurikulum	Angka partisipasi kasar TK/PAUD	Persentasi	52.71	52.71
		Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	Persentasi	69.86	69.86
		Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	Persentasi	77.09	77.09
		Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	Persentasi	78.27	78.27
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentasi	100	100
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SD	Persentasi	88.44	88.44
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SMP	Persentasi	70.73	70.73
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang TK/PAUD	Persentasi	79.59	79.59

No.	Sasaran/Outcome /Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2022
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efeltipitas dalam penyusunan laporan perencanaan	Point	82.43	82.43
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Point	82.43	82.43
		Peningkatan Mutu SDM dalam pelayanan terhadap masyarakat	Point	82.43	82.43
		Peningkatan Kedisplinan dan Mutu Pelayanan Aparatur terhadap masyarakat	Point	82.43	82.43
		Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran	Point	82.43	82.43
	Kinerja Utama				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penduduk Usia sekolah SD dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	Siswa	198,798	198,798
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penduduk Usia sekolah SMP dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	Siswa	81,011	81,011
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Penduduk Drop out sekolah dapat melanjutkan pendidikan dan memiliki Ijazah kesetaraan	Warga Belajar	12,057	12,057
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penduduk Usia Pra Sekolah (Usia Dini) dapat mengikuti pengenalan pendidikan melalui pendidikan Pra Sekolah (TK / PAUD)	Peserta Didik	56,095	56,095

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN

H. RONIANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI (2022) DENGAN RENCANA SESUAI RENSTRA

INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN

No.	Sasaran/Outcome /Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Akumulasi Tahun 2022	Rencana Sesuai Renstra
1	**SASARAN**				
	1. Meningkatnya kemampuan membaca	1. Capaian Angka Melek Huruf Latin		99.78	97.16
		2. Capaian Angka Melek Huruf Al Qur'an		82.29	76.91
	2. Meningkatnya Akses pendidikan yang meluas dan merata	Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		**7.40**	**6.98**
	3. Meningkatnya Mutu dan Relefansi	Harapan Lama Sekolah (HLS)		**12.28**	**12.82**
	4. Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan	1, Manajeman Bebasisa Sekolah		100	100
		2. Capaian Indek Kepuasan Masyarakat		**82.43**	**78.42**
	5. Meningkatnya Tatakelola Dinas	1. Pemenuhan Dukungan Manajemen	Dokumen	6	6
		a. Dokumen Perencanaan		4	4
		b. Laporan Kinerja dan Keuangan		1	1
		c. Dokumen Data dan Informasi yang		1	1
		2. Pemenuhan Pelayanan Administrasi (Persentasi Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran)	Persen	100	100
		3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana (Persentasi Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik)	Persen	100	100
	OUTCOME				
	Program Pengelolaan Pendidikan	Aksara	Persentasi	96.58	96.58
		Angka partisipasi kasar PAUD/TK	Persentasi	52.71	68.82
		Angka partisipasi kasar SD	Persentasi	100.42	100
		Angka partisipasi kasar SMP	Persentasi	110.89	100
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket	Persentasi	90.68	100
		Angka Partisipasi Murni (APM)	Persentasi	94.30	99.84
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik jenjang SD	Persentasi	88.44	98.2
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik	Persentasi	55.24	61.09
		Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	Persentasi	69.86	90
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik jenjang	Persentasi	70.73	99.4
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki	Persentasi	55.24	60
		Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	Persentasi	77.09	70.08
		Capaian Indek SPM Pendidikan Dasar yang terdiri dari unsur : 1. Ketersedian Ruang Kelas dengan Rasio : Jml rombel <= 32 siswa 2. Ketersediaan Guru Berizah S1 / D.IV 3. Setiap satuan pendidikan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS)	**Point**	91.40	91.40
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada	Persentasi	79.59	73.4
		Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	Persentasi	78.27	81
		Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup melalui Lembaga Kursus dan	Lembaga	75	75
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts	Persentasi	106.52	100
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentasi	100	100
		Meningkatnya Angka Lulusan SMP/MTs	Persentasi	99.23	99.99
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SD	Persentasi	62.46	71.27
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SMP	Persentasi	76.36	81.5
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki	Persentasi	33.02	70
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki	Persentasi	64.73	70
	Program Pengembangan Kurikulum	Angka partisipasi kasar TK/PAUD	Persentasi	52.71	68.82
		Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	Persentasi	69.86	90
		Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	Persentasi	77.09	70.08

No.	Sasaran/Outcome /Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Akumulasi Tahun 2022	Rencana Sesuai Renstra
		Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	Persentasi	78.27	81
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentasi	100	100
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada	Persentasi	88.44	98.2
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada	Persentasi	70.73	99.4
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada	Persentasi	79.59	73.4
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efeltipitas dalam penyusunan laporan	Point	82.43	78.4
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Point	82.43	78.4
		Peningkatan Mutu SDM dalam pelayanan terhadap masyarakat	Point	82.43	78.4
		Peningkatan Kedisplinan dan Mutu Pelayanan Aparatur terhadap masyarakat	Point	82.43	78.4
		Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran	Point	82.43	78.4
	Kinerja Utama				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penduduk Usia sekolah SD dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan	Siswa	198,798	198,798
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penduduk Usia sekolah SMP dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan	Siswa	81,011	81,011
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Penduduk Drop out sekolah dapat melanjutkan pendidikan dan memiliki Ijazah	Warga Belajar	12,057	12,057
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penduduk Usia Pra Sekolah (Usia Dini) dapat mengikuti pengenalan pendidikan melalui pendidikan Pra Sekolah (TK / PAUD	Peserta Didik	56,095	56,095

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

H. RONIANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006